



PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH BERBASIS KAWASAN



Dr. Mukhlis Sufri, SE, M.Si

KRETAKUPA *Print*
MAKASSAR

PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH BERBASIS KAWASAN

DR. Mukhlis Sufri,SE,MSi

KRETAKUPA *Print*
MAKASSAR

PERPUSTAKAAN NASIONAL RI

Katalog Dalam Terbitan

MUKHLIS SUFRI

PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH BERBASIS KAWASAN

Oleh : **Dr. Muhklis Sufri, SE, M.Si**

Cetakan Pertama : 2013

KRETAKUPA Print, Makassar

iv + 115 hal. ; 25 x 18

ISBN : **978-602-9060-72-0**

HAK CIPTA dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak dalam bentuk apapun

Tanpa IZIN tertulis dari penulis

Lay Out & Design Cover : Andi Asraf Bunyamin

Kata Pengantar

Dalam era pelaksanaan Otonomi Daerah diperlukan serangkaian upaya yang dilakukan oleh pemerintah seiring dengan pola perencanaan yang telah diatur dalam ketentuan yang ada. Implikasi dari itu, maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang dan peraturan lainnya untuk mengarahkan potensi yang dimiliki oleh daerah. Melalui pendekatan kawasan, baik berkaitan dengan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) maupun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Keduanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perencanaan lainnya untuk menjadi pedoman dan arah pengembangan potensi dan keunggulan yang dimiliki oleh suatu daerah.

Karena itu dalam buku ini mengungkap konsep dan pendekatan untuk merumuskan potensi tersebut ke dalam satu kesatuan perencanaan yang diharapkan dapat dikembangkan oleh semua pihak. Meskipun penulis menyadari bahwa apa yang diungkap dalam buku ini masih banyak memiliki kelemahan dan kekurangan karena apa yang diuraikan bukanlah suatu yang bersifat final, sebab itu penulis membuka ruang untuk semua pihak untuk memberikan saran dan bahkan kritikan guna melengkapi penerbitan selanjutnya. Tetapi bagaimanapun juga buku ini memberikan manfaat setidaknya informasi tentang urgensi pengembangan ekonomi berbasis kawasan.

Penulis menyampaikan penghargaan kepada berbagai pihak yang terlibat dalam mendukung penulisan dan penerbitan buku ini khususnya pihak KAPET dan penerbit.

Makassar, Oktober 2013

Penulis

DR. Mukhlis Sufri,SE,MSi

Daftar Isi

Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Bab I Pendahuluan	1
Bab II KONSEP PEMBANGUNAN DAN DAYA SAING EKONOMI BERBASIS KAWASAN	5
A. Konsep Pengembangan Ekonomi	5
B. Konsep Daya Saing Ekonomi Berbasis Kawasan	27
BAB III INTEGRASI PERENCANAAN DAN KERANGKA DESAIN PENGEMBANGAN EKONOMI BERBASIS KAWASAN	35
A. Integrasi Perencanaan Pembangunan	43
B. Kerangka Desain Pengembangan Ekonomi berbasis Kawasan.	31
BAB IV POTENSI PENGEMBANGAN KAWASAN BERBASIS UNGGULAN	63
A. Potensi Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) dan Kawasan Ekonomi Khusus(KEK)	63
B. Potensi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	88

BAB V STRATEGI DAN ARAH PENGEMBANGAN EKONOMI BERBASIS KAWASAN	91
A. Strategi Pengembangan	91
B. Arah Pengembangan	95
Daftar Pustaka	106

BAB I

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, obsesi otonomi daerah yang menjadi semangat dari undang-undang ini merambah ke mana-mana termasuk didalamnya terhadap upaya-upaya mengembangkan potensi ekonomi yang ada di daerah.

Persoalannya kemudian, pada tahap awal berbagai masalah yang muncul dari upaya mengkonsolidasi kemampuan daerah untuk menggerakkan potensi yang dimiliki guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan baik jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

Keadaan yang terjadi ketika itu adalah dilema. Di satu sisi begitu kuatnya keinginan Pemerintah Daerah untuk mengakselerasi pembangunan daerah yang mendorongnya ke arah pembebanan secara berlebihan kepada para pelaku usaha sebagai sumber penerimaan daerah, sedang di sisi lain pemberlakuan cara-cara yang demikian itu dapat menjadi pemicu bagi kesulitan pengembangan dari berbagai aspek di dalam mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki,

sehingga boleh jadi pelaksanaan pengembangan ekonomi lokal menjadi lamban disatu sisi dan didsisi lain berhadapan dengan kuatnya pengaruh eksternal berupa liberalisasi perdagangan yang menuntut strategi dan penguatan ekonomi daerah menjadi sangat penting.

Kondisi yang demikian itu ternyata bisa dilewati seperti apa yang bisa disaksikan saat ini. Secara perlahan, Pemerintah Daerah dapat mengatasi sebagian kesulitan dalam membiayai pembangunan daerahnya, sementara para pelaku usaha juga mendapat kesempatan untuk mengembangkan usahanya. Menariknya, karena keadaan yang sebelumnya menghadapi antara kebijakan pemerintah daerah dengan keprihatinan atas kelangsungan pelaku usaha, telah mulai menemukan kreasi baru berupa kesadaran terhadap potensi yang dimiliki oleh daerah dan peluang Pengembangan Ekonomi sebagai harapan bersama.

Semangat untuk mengembangkan ekonomi daerah ternyata bukan menjadi persoalan yang berkisar pada setiap daerah itu sendiri. Melainkan juga terpaut dengan perubahan-perubahan global yang telah ikut merambah perekonomian. Kemudian mewaspadai kekuatan dari globalisasi yang mengancam bagi Pengembangan Ekonomi Lokal. Ancaman tersebut berada pada era persaingan yang begitu kompetitif. Siapa yang lemah akan tersingkir, kalah dalam kualitas akan terhempas, tanpa daya saing akan meranggas. Ungkapan-

ungkapan semacam itulah yang familiar di era globalisasi ini. Buku ini secara bersamaan pula membawa peringatan bagi para pemangku kepentingan pada tingkat lokal, bahwa idiom-idiom globalisasi tersebut tentu juga dapat dihadapi dengan kemampuan mengoptimalkan potensi dan keunggulan yang dimiliki suatu daerah untuk menguatkan kelembagaan ekonominya. Dan meningkatkan daya saing komoditi yang dihasilkan dari sektor-sektor ekonomi yang dimilikinya. Serta iklim investasi yang dimiliki oleh suatu daerah. Resepnya terkandung di dalam optimalisasi daya saing ekonomi daerah yang tentu dapat mengambil bentuk berupa pengembangan ekonomi berbasis kawasan. Peluang yang dibentangkan pada bagian ini tampak terbuka lebar dan dengan daya dukung lingkungan yang kondusif.

Buku ini mengarahkan implikasi sebuah kebijakan nasional yang terpadu, serta mengacu pada bagaimana mengoptimalkan potensi ekonomi daerah melalui pendekatan kawasan. Dengan pendekatan kawasan tersebut dapat tercipta sebuah aglomerasi ekonomi yang dapat menciptakan efisiensi, dan *multiplier effect* lebih luas dengan melibatkan masyarakat dalam pengembangan ekonomi daerah. Optimalisasi potensi ekonomi daerah berbasis yang merupakan output dari beberapa pendekatan teori untuk mendukung analisis pengembangan kawasan, dengan

menambil contoh Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), dan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) serta kawasan lainnya yang berpotensi untuk dikembangkannya misalnya urgensi pembentukan Kawasan Niaga Maritim (KNM) pada daerah-daerah yang memiliki sumber daya laut menjadi bagian yang akan diungkap dengan maksud mengoptimalkan potensi niaga pada wilayah pantai dan pesisir di daerah kabupaten kota yang prospektif dikembangkan menjadi sebuah Kawasan.

Oleh karena Pengembangan kawasan tidak dipisahkan dengan strategi dan kebijakan yang efektif dalam kurun perencanaan yang telah dijalankan oleh daerah dimana ada kawasan itu berada. Karenanya dibutuhkan integrasi, konsistensi, sinkronisasi dan evaluasi terhadap proses pembangunan yang disesuaikan dengan Perencanaan jangka panjang, menengah maupun jangka pendek, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah, bahkan dikaitkan pula dengan keseriusan upaya pemerintah mempercepat proses pembangunan yang dirancang dalam sebuah Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) melalui konsep pendekatan enam koridor untuk dimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah.

BAB II

KONSEP PEMBANGUNAN DAN DAYA SAING EKONOMI BERBASIS KAWASAN

A. Konsep Pembangunan Ekonomi dan Kawasan

1. Pembangunan Ekonomi

Konsep pembangunan didefinisikan beragam oleh para ahli dengan berbagai sudut pandang. Sukirno (1985) mengemukakan bahwa walaupun kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi selalu ditujukan untuk mempertinggi kesejahteraan dalam arti seluas-luasnya, kegiatan ekonomi selalu dipandang sebagai sebahagian dari keseluruhan usaha pembangunan yang di jalankan oleh sesuatu masyarakat. Pembangunan ekonomi meliputi usaha sesuatu masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan mempertinggi tingkat pendapatan masyarakatnya, sedangkan keseluruhan usaha-usaha pembangunan meliputi juga usaha-usaha pembangunan sosial, politik dan kebudayaan. Dengan

pembatasan tersebut, maka pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang.

Secara spesifik Jhingan (2007) mengemukakan perkembangan ekonomi dapat dilihat melalui tiga cara. Pertama, perkembangan ekonomi harus diukur dalam arti kenaikan pendapatan nasional nyata dalam suatu jangka waktu yang panjang. Kedua, berkaitan dengan kenaikan pendapatan nyata per kapita dalam jangka panjang. Ketiga, ada kecenderungan lain untuk mendefinisikan perkembangan ekonomi dari titik tilik kesejahteraan. Dari pandangan tersebut di atas, maka dapat di simpulkan bahwa pembangunan ekonomi dicirikan oleh: 1) suatu proses yang berarti merupakan perubahan yang terjadi terus-menerus, 2) usaha untuk menaikkan pendapatan per kapita dan pendapatan nasional, dan 3) kenaikan pendapatan itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang.

Dari sudut pandang administrasi pembangunan oleh Siagian (2008) mengemukakan bahwa pembangunan merupakan rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan

perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Dengan pengertian tersebut, maka pembangunan secara lebih detail mengandung : 1) suatu proses, berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang di satu pihak bersifat independen akan tetapi di pihak lain merupakan bagian dari sesuatu yang tanpa akhir, 2) pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan, 3) pembangunan dilakukan secara terencana, 4) rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan, 5) pembangunan mengarah kepada modernitas, 6) modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan bersifat multidimensional, 7) semua hal tersebut ditujukan untuk pembinaan bangsa.

Pertumbuhan ekonomi telah mengakibatkan terjadinya perubahan struktur perekonomian. Transformasi struktural sendiri merupakan proses perubahan struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri, perdagangan dan

jasa, dimana masing-masing perekonomian akan mengalami transformasi yang berbeda-beda.

Pada umumnya transformasi negara-negara berkembang adalah transformasi dari sektor pertanian ke sektor industri. Perubahan struktur atau transformasi ekonomi dari tradisional menjadi modern secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perubahan dalam ekonomi berkaitan dengan komposisi penyerapan tenaga kerja, produksi, perdagangan, dan faktor-faktor lain yang diperlukan secara terus menerus untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial melalui pendapatan perkapita (Chnenery 1986).

Berdasarkan tersebut di atas, maka jelas kiranya jika pembangunan pada intinya dimaksudkan sebagai upaya perubahan ke arah yang lebih baik dalam berbagai dimensi yang dilakukan secara terencana untuk jangka waktu tertentu. Ini berarti pembangunan tersebut melibatkan pelaku, terdapat proses di dalamnya, serta arah yang ingin dicapai dalam berbagai aspek kehidupan.

Dalam perspektif tersebut di atas, maka indikator pembangunan bisa berbeda untuk setiap Negara. Di Negara-

negara yang tergolong miskin, indikator pembangunannya tentu berbeda dengan indikator pembangunan di Negara-negara maju. Pada negara-negara miskin ukuran pembangunannya masih sekitar kebutuhan dasar seperti listrik, layanan kesehatan, dan kebutuhan makanan.

Pada Negara-negara yang telah dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut di atas, tentunya indikator pembangunannya menurut Tikson (2005) akan bergeser kepada faktor-faktor sekunder dan tersier, seperti : 1) pertumbuhan ekonomi yang mendorong pemerataan, kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup, 2) menguatkan ekonomi nasional/domestic yang dapat memperluas lapangan kerja, sehingga daya beli masyarakat terus meningkat baik terhadap barang local maupun impor, 3) diversifikasi kegiatan/sektor ekonomi dengan penguatan sektor industri dan jasa disertai dengan keseimbangan antara produksi barang ekspor dan impor, 4) partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik dan proses pembuatan keputusan, 5) tersedianya kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi semua lapisan serta penguatan hak-hak asasi manusia.

Indikator pembangunan dalam pandangan Todaro (1983) dikemukakannya mencakup : 1) tingkat pertumbuhan pendapatan per kapitas, 2) tingkat pertumbuhan produktivitas, 3) tingkat transformasi struktur ekonomi, 4) tingkat transformasi social politik dan ideologi, yaitu perubahan dan pementapan sistem sosial, politik, dan ideologi nasional, dan 5) jangkauan ekonomi internasional, yaitu sejauhmana pengaruh ekonomi nasional Negara yang bersangkutan terhadap ekonomi internasional.

Indikator pembangunan yang digunakan Todaro ini cukup akomodatif. Karena tidak hanya mempertimbangkan dari sisi ekonomi-melainkan juga memasukkan aspek sosial, politik dan ideologi dalam indikator pembangunan tersebut. Hal mana menjadi perdebatan dari banyak ahli terhadap konsep pembangunan dalam arti pertumbuhan ekonomi saja, dimana kemungkinan terjadinya pertumbuhan ekonomi tanpa didukung oleh perubahan sosial, sehingga suatu saat dapat terjadi stagflasi (Ndraha, 1987). Dengan demikian indikator pembangunan dari Todaro ini memiliki cakupan yang luas dan akomodatif untuk digunakan dalam mengukur kemajuan pembangunan suatu bangsa atau daerah.

Pembangunan sebagai suatu konsep tentu mempunyai hubungan dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Pengaruh dari berbagai faktor terhadap pembangunan ini juga terpolarisasi dalam pandangan para ahli. Todaro (1983) misalnya, mengemukakan tiga faktor yang berpengaruh terhadap suatu pembangunan. Ketiga faktor tersebut adalah : 1) akumulasi modal termasuk semua investasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan sumberdaya manusia, 2) perkembangan penduduk dalam arti peningkatan tenaga kerja baik kuantitas, maupun kualitas, dan 3) kemajuan teknologi, yakni hasil cara baru yang telah diperbaiki dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tradisional. Lebih jauh dikemukakan oleh Todaro (2006) bahwa tujuan inti pembangunan adalah 1) peningkatan ketersediaan, serta perluasan distribusi berbagai kebutuhan hidup pokok 2) peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa pendapatan, pendidikan, serta peningkatan perhatian dan nilai-nilai cultural dan kemanusiaan dan 3) perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan.

Pandangan Todaro tersebut mengetengahkan jika pembangunan dipengaruhi oleh akumulasi modal dan

investasi, perkembangan tenaga kerja serta pemanfaatan teknologi dalam proses produksi. Di sisi lain juga memberi tekanan pentingnya peningkatan pendapatan yang disertai dengan nilai-nilai kultural yang berkembang di masyarakat yang turut berpengaruh dalam poroses pembangunan dan perluasan ekonomi, baik secara individu maupun secara bersama-sama untuk kepentingan negara.

2. Konsep Pembangunan Wilayah dan Kawasan

Dalam Perencanaan Pembangunan nasional maupun perencanaan pembangunan daerah menurut Tarigan (2004) dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pendekatan sektoral dan pendekatan regional (wilayah).

Pendekatan sektoral yakni dengan memfokuskan perhatian pada sektor-sektor kegiatan yang ada diwilayah tersebut. Kegiatan ini mengellompokkan kegiatan ekonomi antara sektor-sektor ekononomi yang seragam atau dianggap seragam. Sedangkan pendekatan regional melihat pemanfaatan ruang serta interaksi berbagai kegiatan dalam ruang wilayah. Lebih lanjut dikemukakan bahwa perbedaan-perbedaan fungsi ruang yang satu dengan yanglainnya saling

berinteraksi untuk diarahkan kepada tercapainya kehidupan yang efisien dan nyaman. Perbedaan fungsi terjadi karena perbedaan lokasi, perbedaan potensi, dan perbedaan aktivitas utama pada masing-masing ruang yang harus diarahkan untuk bersinergi agar saling mendukung penciptaan pertumbuhan yang serasi dan seimbang.

Pendekatan regional pengelompokan dapat dilakukan atas dasar batas administrasi pemerintahan seperti kabupaten kota, kecamatan dan desa atau atas dasar wilayah yang pengaruh dari pusat pertumbuhan (*growth centr*)

Diera yang semakin maju urgensi pembangunan membutuhkan suatu wilayah atau kawasan untuk memudahkan mengembangkannya agar tumbuh lebih cepat dan mempengaruhi wilayah lainnya secara simultan.

Pandangan Ferroux dalam Adisasmita (2004) bahwa konsep kutub pertumbuhan merupakan suatu konsep yang sangat menarik bagi para perencana wilayah. Kemudian lebih jauh memberi penafsiran dalam dua pengertian yaitu secara fungsional dan secara geografis. Dan secara fungsional menggambarkan kutub pertumbuhan itu sebagai suatu kelompok perusahaan, cabang industri, atau unsur-unsur

terkait dengan kondisi geografis, tetapi adanya permulaan dalam serangkaian perkembangan. Kemudian memberi dampak pertumbuhan, menciptakan daya tarik dan mengundang berbagai aktivitas tanpa adanya keterkaitan dengan usaha-usaha yang ada. Meskipun sebetulnya tidaklah berarti bahwa kutub pertumbuhan secara fungsional dipandangan tidak mempunyai pengaruh atau akibat terhadap perkembangan geografis karena kegiatan ekonomi itu tentunya berkembang disuatu tempat (tata ruang), maka perkembangannya menyangkut pula aspek geografis.

Perencanaan tata ruang dari berbagai sudut pandang dalam proses perencanaan dan pengembangannya melibatkan banyak orang. Kemudian dalam penataannya masyarakat dari berbagai komponen memiliki akses dalam proses perencanaan agar tujuan penataan ruang dapat menciptakan hubungan yang serasi antara berbagai kegiatan berbagai sub wilayah agar tercipta hubungan yang harmoni dan serasi (Tarigan 2004).

Selain itu penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah menetapkan beberapa kawasan dan penggunaannya dengan berpedoman pada ketentuan RTRW nasional, provinsi dan

kabupaten yang tidak terpisahkan dengan sistem perencanaan pembangunan berjenjang. Misalnya telah diatur kawasan lindung, kawasan budi daya, kawasan industri, dan kawasan lainnya yang berada dalam satu kesatuan perencanaan dan pemanfaatannya.

Dalam perspektif pembangunan ekonomi berbasis kawasan memandang adanya kesamaan kepentingan baik secara geografis maupun secara fungsional dalam sebuah kawasan. Karena kawasan adalah batas tertentu dalam wilayah hukum NKRI yang telah ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu (UU 39/2009). Karena itulah pembangunan ekonomi kawasan dibangun dari adanya kehendak untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Inspirasi pembentukan kawasan menurut Rondinelli dalam Hidayat (2010) berawal dari adanya kisah sukses pembentukan *Special Economi Zone*(SEZ). Kemudian di Eropa pada awal tahun 1950-an pasca Perang Dunia Ke II. Lebih lanjut dalam Hidayat dikatakan bahwa KEK itu sendiri adalah suatu kawasan yang secara geografis dan yurisdiktif

merupakan kawasan dimana perdagangan bebas, termasuk kemudahan dan fasilitas *duty free* atas impor barang-barang modal untuk bahan baku komoditas ekspor, dibuka seluas-luasnya. (Johansson and Nilson, 1997)

Kemudian Prabowo dalam Hidayah (2010) mengungkapkan bahwa tahun 1970-an banyak negara-negara berkembang yang melaksanakan pembentukan kawasan-kawasan khusus pembangunan ekonomi dengan tujuan utama adalah pengintegrasian perusahaan-perusahaan yang beroperasi di dalamnya dengan ekonomi global dengan cara melindungi mereka terhadap berbagai macam distorsi seperti tariff dan birokrasi yang berbelit-belit.

Beberapa pertimbangan yang telah mendasari pembangunan kawasan khusus.

Pertama adalah apa yang dewasa ini disebut *good-governance*.

Kedua berkaitan dengan skala ekonomi dari jaringan infrastruktur modern yang lebih ekonomis untuk dibangun dalam kawasan yang luas terbatas.

Ketiga adalah keterkaitan antar industri, Perkembangan investasi dan industri cenderung ke arah pembangunan jaringan antara perusahaan dan bukan lagi integrasi vertikal maupun horizontal dari berbagai kegiatan ke dalam satu perusahaan (konglomerasi). Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan sarana dan kompleks antara berbagai industri karena kawasan ini berpotensi untuk menciptakan biaya yang murah dalam lokasi yang saling berdekatan antara berbagai perusahaan.

Keempat adalah menciptakan efisiensi yang ditimbulkan oleh dampak aglomerasi industri .

Pembangunan kawasan seperti ini diharapkan membuka lapangan kerja, menciptakan daya tarik investasi untuk mengembangkan potensi ekonomi kawasan yang memiliki keterkaitan yang kuat antara sektor dan pengembangan ekonomi lokal pada kawasan yang dimaksudkan.

Berdasarkan konsep yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, maka kedudukan kawasan dalam ruang yang didasarkan pada kepentingan yang sama, baik dilihat dari sisi geografis maupun hubungan fungsional, menjadi dasar dalam merumuskan pengembangan ekonomi daerah berbasis

Kawasan, baik Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) maupun kawasan lainnya yang ada, dan menarik dikembangkan sebagai mana tujuan pembentukannya dan terintegrasi dengan pola perencanaan daerah yang ada dalam lingkup Kawasan tersebut untuk selanjutnya merangsang kegiatan ekonomi masyarakat setempat dari hulu hingga hilir. Bahkan menjadi sebuah aglomerasi yang menciptakan efisiensi dan aksesibilitas yang tinggi untuk mempercepat akselerasi pergerakan sektor-sektor lapangan pada kawasan yang telah ditentukan berdasarkan pandang teoritis maupun empiris. Karena itu konsep ini penting diimplementasikan dan didorong melalui strategi dan arah kebijakan mendukungnya, sehingga berdampak langsung dan memperkuat pilar ekonomi ekonomi daerah dalam menghadapi tantangan dan menciptakan peluang-peluang bagi tumbuhnya usaha ekonomi berdaya saing kuat pada lingkup kawasan.

Dalam Pembangunan kawasan yang paling tepat dan sesuai dengan itu adalah konsep pengembangan dengan menggunakan pendekatan keruangan sebagai mana telah diatur dalam ketentuan UU No.26 /2007 tentang penataan

ruang dan PP No.26/2008 tentang RTRWN dalam jajaran X Kawasan Nasional yang didalamnya terdapat Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), sehingga pengembangannya harus di prioritaskan. Dalam proses pengembangannya tentu diharapkan tidak lagi bersandarkan pada konsep kutub pertumbuhan (*growth pole theory*), melainkan diarahkan pada optimalisasi potensi yang berbasis pada klaster dan yang dapat mendukung penguatan ekonomi lokal (*local economic development*), dengan bertumpu pada komoditas unggulan kawasan secara selektif.

3. Konsep Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Kawasan

Optimalisasi potensi untuk menguatkan ekonomi lokal berbasis kawasan dapat didukung oleh pandangan Blakely (1989) bahwa pembangunan ekonomi lokal pada hakekatnya merupakan proses kemitraan antara pemerintah daerah dengan para *stake holders* termasuk sektor swasta dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia maupun kelembagaan secara lebih baik melalui pola kemitraan dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi daerah dan menciptakan pekerjaan baru.

Kemudian memberi ciri utama pengembangan ekonomi lokal adalah pada titik beratnya pada kebijakan "*endogenous development*" dengan mendaya gunakan potensi sumber daya manusia, institusional dan fisik setempat. Dengan pandangan ini memberi makna potensi kawasan yang ada agar berorientasi pada kepentingan pembangunan fokus penciptaan lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Berkaitan dengan perspektif kemandirian lokal Gani (2001) menyebutkan tiga aspek berkaitan dengan itu :

- a. Berorientasi pada pemenuhan kebutuhan tatanan masa kini tanpa mengorbankan kebutuhan masa depan
- b. Berbasis pada ketersediaan sumber daya yang dimiliki dan
- c. Dikelola atas dasar peran serta (partisipatif masyarakat perlu dibuka lebih lebar lagi.

Lebih jauh mengungkapkan bahwa negara akan jadi kuat karena didukung oleh pilar-pilar daerah atau tatanan yang kuat dan mandiri (desa, kecamatan, kabupaten, provinsi wilayah yang kuat). Bukan seperti selama ini dinyatakan kuat karena ditarik oleh lokomotif tunggal yang

bernama pemerintah pusat. Karena itu urgensi pengembangan potensi daerah dalam pengembangannya akan menguatkan ekonomi kawasan itu sendiri dalam melakukan aktivitas yang mengarah pada pemenuhan kebutuhan yang berbasis pada ketersediaan sumber daya dalam lingkup lokasi yang berpotensi tumbuh sebagai wilayah atau kawasan ekonomi bersama, maka secara teori menunjukkan bahwa tataruang (*space*) dalam analisis ekonomi menjadi sangat penting.

Penguatan ekonomi lokal berbasis kawasan ini menekankan pada aspek kelembagaan ekonomi berupa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dengan adanya aktivitas ekonomi daerah yang difasilitasi oleh masing-masing daerah di kawasan yang ada maka Usaha Mikro Kecil dan Menengah semakin tumbuh. Hal ini adalah merupakan peran dan fungsi pengelola kawasan untuk mendorong ekonomi masyarakat secara sinergis dalam kerangka perencanaan KAPET dan KEK, serta Kawasan yang dibentuk pada tingkat daerah kabupaten kota, sehingga konsep hulu dan hilir dapat semakin berkembang dalam

rangka mengoptimalkan potensi dan keunggulan lokal yang dimiliki oleh kawasan yang ada.

Oleh karena pengembangan ekonomi lokal adalah menjadibagian dari pengembangan ekonomi masyarakat setempat, maka dibutuhkan kreativitas untuk mendayagunakan potensi lokal yang ada. Kreativitas masyarakat sangat ditentukan pula oleh nilai-nilai lokal yang tumbuh dalam satu kesatuan komunitas yang memiliki prakarsa serta mandiri dengan inovasi yang tinggi.

Masyarakat pada tingkat lokal tentu berbeda dalam prakarsa dan pendekatan penguatan ekonomi dan pengembangan ekonomi lokal. Masyarakat Bugis Makassar tentu berbeda dengan masyarakat sunda dan Jawa. Namun secara keseluruhan indonesia dengan keanekaragaman masi berada dalam satu kesatuan nilai perekat untuk membangun tatanan dan nilai yang progresif dalam berbagai bidang. Landasan filosofis inilah menurut hemat kami sebagai perwujudan munculnya ekonomi kreatif yang dibangun dari akar budaya yang progresif dan bermakna dalam realitas kehidupan yang makin kompetitif dan makin maju untuk

menghindar dari ketergantungan dan kemiskinan. Karena itu penguatan ekonomi lokal adalah sebuah keinsyaan.

Kawasan ekonomi yang dibangun dari pendekatan sektoral maupun pendekatan kewilayaan yang memiliki kesamaan hingga dikelola dalam tataruang yang efektif dalam sebuah kawasan, maka kreativitas masyarakat turut berpengaruh positif terhadap pengembangan kawasan yang ada. Mengisi aktivitas kawasan tergantung dari sejauhmana aktivitas ekonomi masyarakat dari berbagai sektor memaknai kawasan yang ada tumbuh bersama dengan masyarakat disekitarnya.

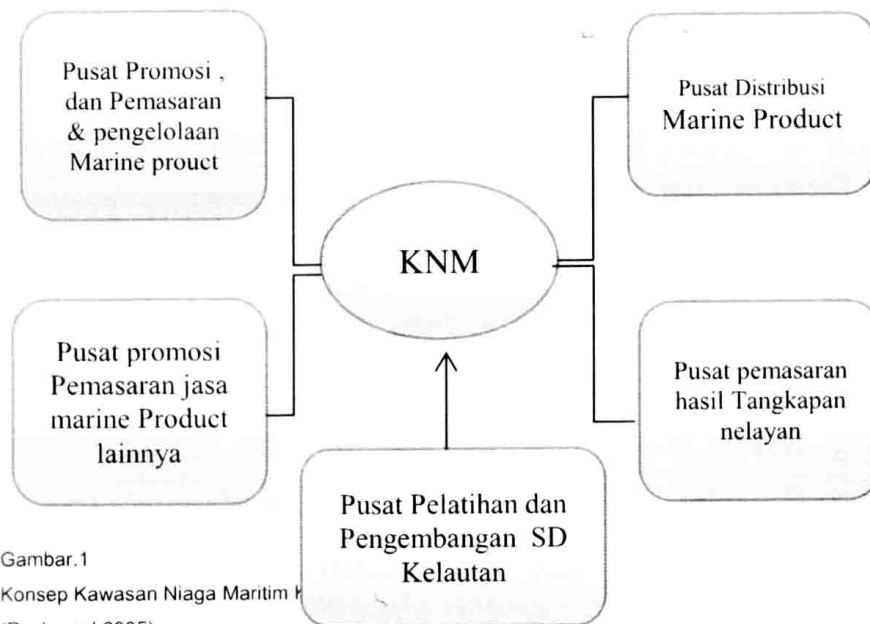
4. Konsep Pengembangan gagasan Kawasan Niaga Maritim (KNM).

Indonesia memiliki sumber daya laut dan kemaritiman hampir seluruh daerah memilikinya, dan berpotensi menjadi daerah niaga maritim yang prospektif ditinjau dari berbagai aspek, dari sisi historis , sosial budaya dan politik. Karena itu Kabupaten Kota yang memiliki potensi laut dan pesisir dengan keruangan yang cukup memadai bisa menjadikan isu

pengembangan Niaga maritim (KNM) sebagai bagian dari optimalisasi pengembangan kawasan.

Beberapa hasil studi antarlain Sufri dalam Puskaped (2005) telah mengkaji posisi relatif Makassar Sebagai Pintu Gerbang Kawasan Timur Indonesia, berpotensi menjadi Kawasan Khusus sebagai Kawasan Niaga Maritim, diharapkan dapat bersinergi dengan Kawasan Industri Makassar (KIMA), dan kawasan lainnya. Karena itu tidak berlebihan jika daerah-daerah yang memiliki potensi kelautan dan mengembangkan daerahnya sebagai kawasan niaga maritim adalah sah-sah saja. Sepanjang daerah itu memiliki peran yang cukup strategis dan dukungan pemerintah pusat dan daerah, serta memiliki kriteria sebagai daerah yang memiliki keterkaitan antar regional yang kuat, menjadi pusat pertumbuhan dan tujuan transito produk-produk daerah, menjadi simpul utama jejaring antara kawasan dan pusat pelayanan dengan komunikasi regional dan internasional, memiliki tingkat aksesibilitas yang tinggi, serta jalur perhubungan laut dan udara dengan tingkat mobilitas yang tinggi.

Berikut Konsep pengembangan Kawasan Niaga Maritim (KNM) dapat dilihat pada gambar berikut :



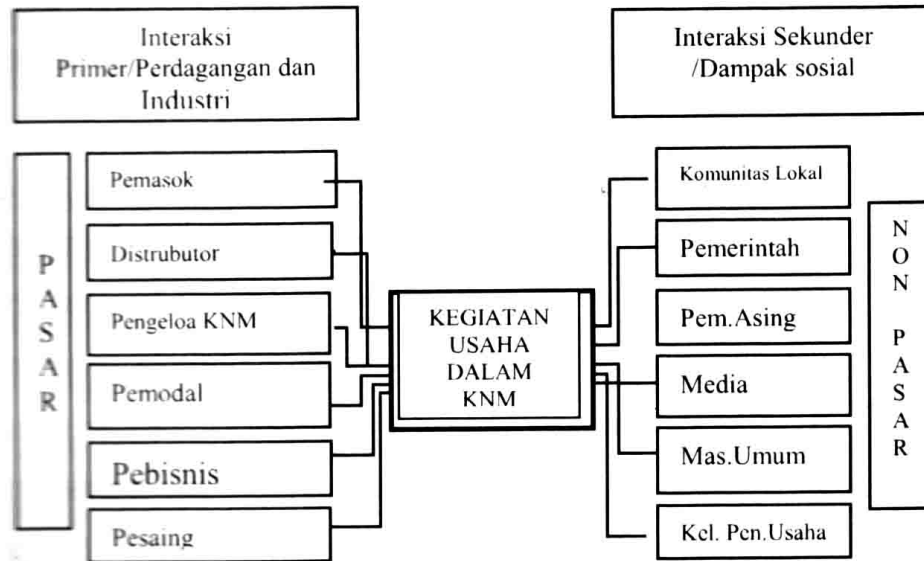
Gambar.1
Konsep Kawasan Niaga Maritim K
(Puskaped, 2005)

Konsep pengembangan Kawasan Niaga Maritim selain memiliki potensi dan peluang untuk dikembangkan khususnya daerah atau kota yang memiliki kawasan yang memiliki posisi strategis menjadi pusat pertumbuhan baru, dengan berbagai aktivitas menjadi pusat distribusi marine prout berorientasi ekspor, menjadi pusat pemasara, pusat promosi dan jasa marine product lainnya. Bahkan menjadi pusat pelatihan dan

pengembangan Sumber daya manusia (SDM) fokus pada pengembangan kapasitas kelembagaan, dan model-model pengembangan pemasaran marine product

Keberadaan Kawasan Niaga Maritim (KNM) ini secara operasional memiliki interaksi yang kuat , baik secara primer maupun sekunder. Interaksi sosial primer yang berhubungan dengan pasar yakni hubungan fungsional sesama pebisnis yang memiliki aneka ragam proct marine, dan hubungan yang kuat dengan masyarakat dari hulu ke hilir, serta hubungan dengan pemodal, supplier distributor, pelanggan dan pesaing. Selain itu juga memiliki hubungan sosial sebagai komunitas sosial dengan kelompok pedagang umum, pemerintah, media dan masyarakat umum. Hubungan interaksi seperti ini disebut hubungan sekunder atau hubungan berkaitan dengan non pasar.

Bagaimana mencermati hubungan yang dimaksud , baik secara primer maupun secara sekunder dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Gambar 2. Model Interaksi Kegiatan
KNM, Pusjaped (2005)

B. Konsep Daya Saing Ekonomi Berbasis Kawasan

Dalam perspektif pengembangan daya saing unggulan ekonomi kawasan, dalam pengelolaannya sangat ditentukan oleh kemampuan pengelola kawasan mengoptimalkan potensi dan keunggulan yang ada di dalam lingkup kawasan tersebut. Kemudian sekaligus berusaha dengan keunggulan daerah yang ada di dalam kawasan yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing dari komoditi yang dihasilkan oleh sektor-sektor yang dianggap basis maupun pengembangan

sektor non basis untuk kemudian menjadi sektor basis dan berpotensi mendukung proses pengembangan kawasan andalan dimasa depan.

Secara teori konsep daya saing suatu negara , atau daerah sangat ditentukan oleh kemampuan menciptakan efisiensi sebagai mana tujuan pembangunan sebuah kawasan. Karenanya menentukan lokasi kawasan adalah tentu saja diukur dari berbagai pendekatan. Salah satu pendekatan yang baik untuk memaknai bahwa kawasan tersebut memiliki posisi strategis dan berpotensi tinggi menjadi kawasan cepat tumbuh dan berdaya saing kuat dengan menggunakan pendekatan analisis *Location Qustion* (LQ).

Selanjutnya dapat menjadi bahan perbandingan dari berbagai aktivitas ekonomi masyarakat melalui usaha yang dikembangkan bahwa usaha tersebut sungguh berpotensi dan prospektif untuk menghasilkan komoditi unggulan yang berkesinambungan yang didukung oleh kemampuan faktor-faktor *Domestik*. Dengan kemampuan membandingkan keunggulan daerah dari aktivitas ekonomi dalam rangka pengembangannya dapat diukur dengan menggunakan

pendekatan analisis *Revealed Comparative Advantage (RCA)*. Suatu model Analisis yang telah dikembangkan oleh Ballasa (1989). Kemudian beberapa para ahli dan peneliti sebelumnya antarlain dikembangkan oleh Tower (1992) dan Gray (1992) serta Person (1987) melalui *Domestic Resour Cost (DRC)* dan bahwa model analisis ini cukup bagus digunakan dalam menganalisis tingkat daya saing suatu komoditi. Kemudian sekaligus melihat tingkat daya saing keunggulan daerah yang dimiliki oleh suatu kawasan. Pendekatan ini juga telah banyak dikembangkan oleh para peneliti sesuai dengan kondisi pengamatan dan dukungan analisis yang memadai.

Beberapa konsep yang menjadi dasar pijakan mengetahui keunggulan daya saing ekonomi suatu kawasan bahkan diarahkan pada pengembangan industri yang berbasis pada komoditi unggulan yang dimilikinya. Implikasi dari pemahaman konsep daya saing berbasis kawasan ini antarlain didukung oleh teori basis dan non basis adalah merupakan perkembangan lebih lanjut dari teori perdagangan Ricardo dan J.S. Mill. Menurut Hoover (1977) bahwa teori ekonomi dasar adalah cara pertumbuhannya yang dapat menimbulkan dan menentukan pembangunan daerah secara

keseluruhan, sedangkan aktivitas-aktivitas lainnya (yang bukan dasar) hanya merupakan akibat-akibat dari seluruh pembangunan daerah. Lebih lanjut dikatakan bahwa penjelasan tentang ekonomi dasar (basis) meliputi dua bagian yaitu (1) penjelasan lokasi aktivitas dasar (2) pencarian proses dimana aktivitas-aktivitas itu secara bersamaan menimbulkan pembangunan aktivitas-aktivitas dasar.

Lebih lanjut dikemukakan oleh Hoover bahwa teori ekonomi dasar menjelaskan tentang aktivitas-aktivitas dasar dengan jalan menarik uang dari dunia luar atau secara umum dengan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa untuk ekspor. Karena itu, daerah tersebut bisa dikatakan daerah mampu berswasembada dalam hal memenuhi kebutuhan daerahnya berupa barang-barang untuk kebutuhan ekspor.

Daerah-daerah yang memiliki sektor basis adalah daerah yang memperoleh indeks *Location Quotion* (LQ) >1 demikian pula sebaliknya sektor non basis jika $LQ < 1$.. Daerah yang memiliki sektor basis pada waktu tertentu adalah daerah yang memiliki sektor yang dianggap unggul dan berpotensi untuk dikembangkan ke arah penciptaan daerah yang memiliki kemampuan untuk melakukan ekspor

atau daerah tersebut memiliki posisi supply yang lebih tinggi pada sektor tertentu dibandingkan dengan sektor lain dan daerah lainnya.

Setelah mengetahui kawasan tersebut adalah kawasan yang memiliki sektor basis, maka komoditi yang dihasilkan pada berbagai sektor dapat diketahui potensi dan keunggulan masing-masing dibandingkan dengan daerah lain dalam lingkup kawasan. Untuk melihat unggul dan tidaknya sangat ditentukan oleh besarnya indeks yang dihasilkan. Jika $RCA > 1$, maka komoditi yang dihasilkan masing-masing daerah yang ada di kawasan tersebut memiliki keunggulan komparatif. Sedangkan tingkat daya saing yang dimilikinya dapat dilihat dari indeks *Domestik Resour Cost* dengan besarnya nilai $DRC < 1$. Jika lebih kecil satu berarti komoditi yang dihasilkan daerah yang ada di dalam kawasan yang telah ditentukan diasumsikan memiliki tingkat daya saing yang tinggi.

Meskipun dalam buku ini hanya memperkenalkan konsepnya saja, tapi paling tidak dalam rangka pengembangan potensi, dan keunggulan serta daya saing suatu kawasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Jika kawasan ekonomi memiliki sektor basis berarti kawasan tersebut berpotensi dapat dikembangkannya kearah penciptaan pengelolaan yang focus pada sektor basis tersebut apalagi komoditi yang dihasilkan memiliki prospek yang berpotensi untuk dikembangkan..
2. Mengetahui bahwa kawasan pengembangan ekonomi suatu wilayah dapat diketahui aktivitas ekonomi kawasan yang akan/dapat dikembangkan, kemudian memiliki unsur sector-sektor yang dapat menghasilkan keunggulan komoditi yang berpotensi untuk dikembangkan dan memberi keuntungan bagi pelaku bisnis dari berbagai lapangan usaha.
3. Kemudian jika suatu kawasan yang unggul dengan komoditi yang dihasilkan dibandingkan dengan daerah lainnya, maka kawasan tersebut dapat dikembangkan tidak hanya untuk kebutuhan dalam negeri, tetapi juga untuk kebutuhan domestik mengoptimalkannya untuk menjadi maju dengan keunggulan komoditi yang berpotensi dan prospektif untuk dikembangkan, maka dengan pendekatan

analisis pendekatan *Revealed Comparative Advantage* (RCA) atau komoditi yang dihasilkan kawasan tersebut memiliki keunggulan yang berpotensi tinggi. Kemudian jika Indeks DRC < 1, maka keunggulan aktivitas ekonomi kawasan memiliki tingkat daya saing yang tinggi.

Dalam kerangka operasionalisasi dan perumusan kebijakan di dalam pengembangan ekonomi berbasis kawasan, maka tergambar arah pembangunan suatu kawasan sesuai keunggulan yang dimilikinya. Dilihat dari sisi struktur ekonomi dan komoditi yang dihasilkan oleh kawasan tersebut diawali dengan analisis sektor basis dan non basis. Kemudian diidentifikasi komoditi yang dihasilkan apa memiliki keunggulan dan berpotensi tinggi mendorong perekonomian pada kawasan yang telah ditentukan.

Tingkat daya saing dimiliki oleh kawasan ekonomi dapat memberi gambaran tentang prospek ekonomi berbasis dimana kawasan yang ada berakar pada usaha-usaha yang produktif. Jika sektor tersebut adalah sektor basis, maka

perumusan kebijakan menempatkan sektor tersebut dapat dioptimalkan secara berkesinambungan, kemudian dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengembangan ekonomi kawasan.

Implikasi dari penggunaan model analisis I analisis LQ, >1 DRC <1 , RCA >1 , dan hasilnya memberi gambaran kegiatan ekonomi masyarakat pada tingkat lokal dan prospektif mendorong tingkat daya saing yang tinggi yang dibarengi dengan meningkatkan pendapatan masyarakat, maka hal ini dapat dicapai jika diarahkan pada pola pengembangan yang mengacu pada kebijakan yang efektif dalam mendorong optimalisasi potensi kawasan yang kemudian terintegrasi dengan pola perencanaan yang dirancang secara partisipatif disesuaikan dengan kondisi dan karakter masyarakat, serta dukungan multi pihak agar secara simultan daya saing ekonomi kawasan dapat terwujud.

Perhatian tentang dimensi ruang dalam kesamaan geografis dan lanskap ekonomi (*economic landscape*) menurut Adiasmita (2004) adalah variable tambahan, tetapi dalam perkembangan yang semakin maju dan kompetitif, maka variabel ini merupakan variabel asal (*indigenous*) yang perlu dioptimalkan dengan baik.

BAB III

INTEGRASI PERENCANAAN DAN KERANGKA DESAIN PENGEMBANGAN EKONOMI BERBASIS KAWASAN

A. Integrasi Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi Kawasan

Kedudukan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai kawasan Strategis yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah dan peraturan dalam negeri, maka dalam Pengembangannya tentu saja diintegrasikan dengan pola pengembangan ekonomi daerah yang ada dalam lingkup kawasan tersebut, baik perencanaan jangka panjang, menengah dan jangka pendek.

Berdasarkan potensi dan posisi strategis KAPET Parepare dan Kawasan Ekonomi khusus (KEK) sebagai Kawasan strategis, maka dalam rangka optimalisasi kawasan

tersebut diperlukan kerangka pengembangannya dengan mengacu pada keterpaduan sistem perencanaan yang terintegrasi dengan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dengan Perencanaan lainnya berupa Kawasan Niaga Maritim (KNM) yang secara formal belum diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah untuk mendukungnya sebagai sebuah kawasan strategis, namun istilah kawasan niaga maritime ini sudah sebagian dipraktekkan oleh kabupaten kota yang memiliki pantai dan pesisir yang potensial sebagai obyek ekonomi yang dapat mensejahterakan masyarakat setempat.

Dalam Kerangka Perencanaan Pembangunan menuju percepatan upaya pengembangannya, maka keberadaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Daerah Indonesia (MP3EI) yang telah diatur dalam ketentuan yang ada, serta kemudian diharapkan terintegrasi dengan proses pengembangan daerah dalam lingkup kawasan secara terpadu, maupun secara khusus dan kawasan lainnya dalam kurun waktu perencanaan. Kedudukan Kawasan tersebut dalam sistem perencanaan yang ada, maupun MP3EI berjalan secara komplementer.

Berdasarkan tersebut, maka dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No 32 Thn 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3I) 2011-2025, antara lain diungkap pentingnya percepatan pembangunan ekonomi secara menyeluruh. Hal ini dapat dimaknai dari urgensi percepatan itu sampai pada tingkat Daerah. Sejalan dengan semangat Otonomi daerah yang menghendaki optimalisasi potensi dan keunggulan daerah, serta percepatan akselerasi pembangunan ekonomi sebagaimana yang diharapkan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah (SPPN-D), baik dalam Rencana Perencanaan Jangka Panjang (RPJPN-D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Daerah (RPJMN-D) maupun rencana pembangunan jangka pendek tahunan, maka daerah kabupaten kota sebagai bagian integral dari pengembangan kawasan menjadi keharusan untuk mengarahkan segala potensi sumber daya yang dimiliki dalam satu kesatuan visi guna mendukung percepatan pembangunan pada berbagai sektor lapangan usaha yang

dimiliki pada kawasan yang dianggap strategis ini dengan berbagai pertimbangan ;

Pertama; Melihat posisi strategis kawasan yang didukung daerah hinterlennya untuk bisa menjadikan kawasan cepat tumbuh dan berkembang sebagai daerah simpul ekonomi yang kuat **Kedua;** daerah tersebut sebagai daerah pusat pemerintahan baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten kota, tentu memiliki konsekuensi logis untuk mengagregasikan kepentingan pembangunan mendukung proses percepatan dan perluasan pembangunan yang seimbang dengan kondisi daerah sesuai fungsi dan tataruang yang telah diatur dalam ketetapan yang ada.

Ketiga; Pembangunan yang semakin maju akan berhadapan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, maka dibutuhkan desain kawasan dalam rangka mengoptimalkan potensi dan keunggulan yang mengarah terciptanya tingkat kesejahteraan masyarakat sesuai tujuan pembangunan.

Berdasarkan tersebut di atas, maka perumusan strategi dan arah kebijakan Pengembangan ekonomi daerah berbasis

kawasan ini menjadi bagian dari perencanaan lainnya yang kedudukannya diatur oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak saja terintegrasi, tetapi juga terkoordinasi antara daerah dan pengelola kawasan, dan pihak kementrian dalam mendorong percepatan dan perluasan, serta optimalisasi dalam pengembangannya, sehingga tujuan perencanaan masing-masing dapat dimaknai untuk satu tujuan adalah pengembangan kawasan ekonomi, bahwa;

- 1) Setiap daerah mengintegrasikan Perencanaan jangka Panjang, memengah dengan visi dan misi serta arah kebijakan masing-masing daera yang ada dalam kawasan, serta dokumenlainnya yang mendukung keberadaan kawasan.
- 2) Menyusun secara bersama matriks program bersama antara pengelola kawasan dengan daerah yang berada dalam kawasan tersebut untuk kemudian bersinergi membentuk kesepakatan memfungsikan

kawasan bersama ini dalam agenda masing-masing sesuai potensi dan keunggulan yang dimilikinya.

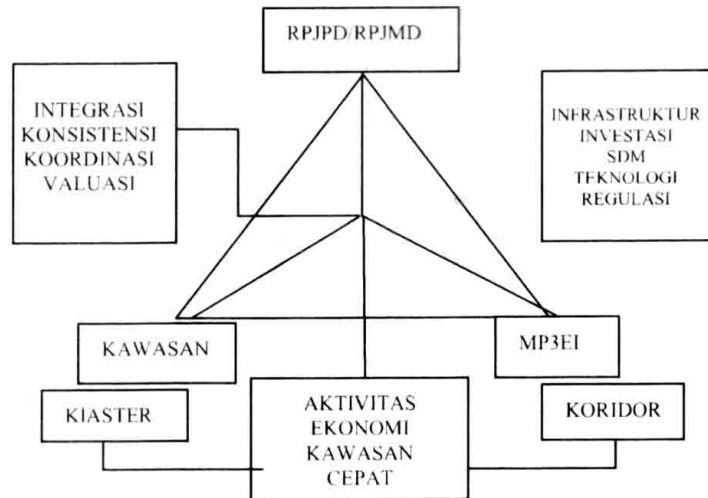
- 3) Mengaitkan kerangka regulasi dan pendanaan yang memperkuat aktivitas ekonomi dalam kawasan dengan pola sharing, serta menciptakan iklim investasi yang difasilitasi oleh pihak pengelola kawasan, dengan peran dan fungsi masing-masing untuk menghindari terjadinya ego sektoral.
- 4) Keberadaan master plan pengembangan kawasan oleh masing-masing daerah dan pengelola kawasan untuk menjadikan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan program-program strategis dalam koridor ekonomi yang telah ditentukan agar dapat diimplementasikan ke dalam kerangka upaya pengembangan kawasan, baik Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) maupun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan lainnya agar kebijakan pengembangan kawasan berdampak langsung pada

kepentingan ekonomi kawasan yang ada. Hal ini akan lebih mudah jika menggunakan pendekatan *spasial* (tata ruang), serta dukungan salah satu metode dalam penajaman strategi dan arah kebijakan, serta perumusan agenda aksi percepatan pembangunan dan perluasan ekonomi daerah di masa depan, sekaligus menjadi acuan dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah sebagai mana Visi Daerah dan Visi Pembangunan dalam kurun waktu perencanaan daerah di wilayah kawasan. Selanjutnya menjadi salah satu pendekatan untuk mempercepat langkah-langkah strategis yang dibangun dari dokumen perencanaan lainnya dalam rangka mempertajam tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

- 5) Konsistensi dan koordinasi serta evaluasi capaian program pengembangan kawasan adalah menjadi keharusan dilakukan agar performance aktivitas ekonomi dan program strategis sesuai dengan

capaian perencanaan pembangunan masing-masing daerah dan kawasan, serta capaian pembangunan nasional dan daerah. Karenanya proses percepatan pengembangan daerah, pembangunan yang akan dirancang dalam Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi adalah merupakan penjabaran dari MP3EI dengan tidak mengabaikan dokumen Perencanaan pembangunan lainnya agar terintegrasi dalam rangka memudahkan untuk mengimplementasikannya sesuai dengan tujuan dan sasaran percepatan pembangunan dan perluasan pembangunan ekonomi, baik secara regional maupun nasional.

Berkaitan dengan itu bukanlah sesuatu yang mudah dicapai jika tidak didukung dengan infrastruktur, investasi, SDM dan teknologi, serta regulasi yang berpihak ada kepentingan pengembangan ekonomi berbasis kawasan.



Gambar 1 Integrasi Perencanaan Pembangunan Berbasis Kawasan

B. Kerangka Desain Pengembangan Ekonomi berbasis Kawasan.

Berdasarkan keterkaitan perencanaan tersebut di atas, Desain ini dimaksudkan untuk memudahkan merumuskan arah dan strategi serta langkah-langka yang efektif digunakan untuk tujuan pengembangan ekonomi melalui optimalisasi potensi kawasan. Untuk memudahkan pengembangannya, maka pendekatan klaster efektif untuk diarahkan, tetapi diarahkan pada pengembangan industri Daerah (PID) dan melibatkan masyarakat jadi mitra dalam rangkaian proses pengembangannya paling tidak beberapa hal yang ingin

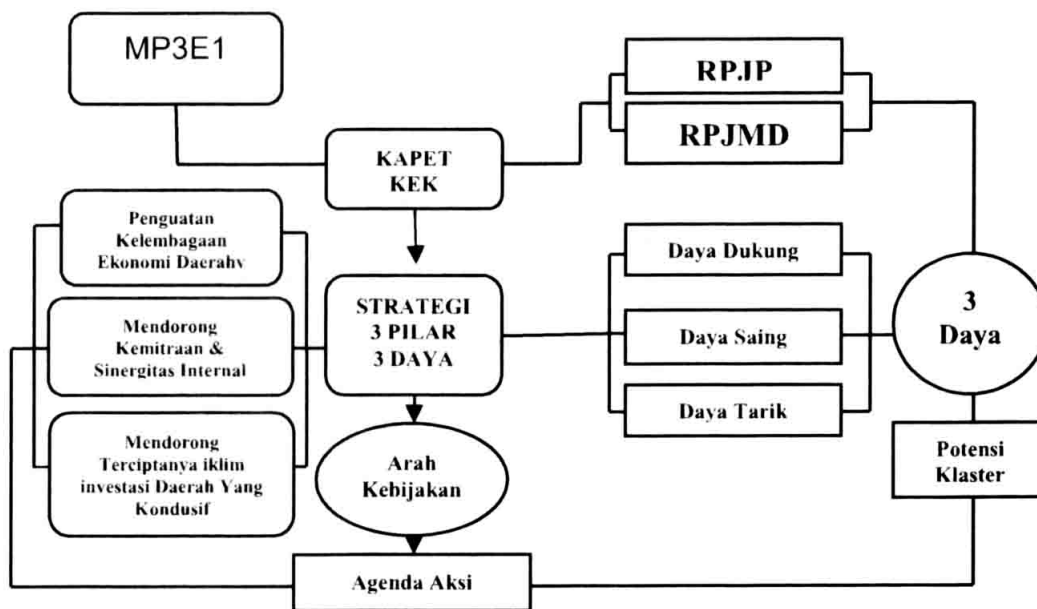
ekonomi, karena didukung oleh kemampaun teknologi dan sumber daya yang potensial untuk mengembangkan ekonomi berbasis kawasan pada setiap daerah yang ada dalam lingkupnya menjadi satu kesatuan perencanaan untuk satu tujuan yakni memberi penguatan ekonomi, baik secara nasional, daerah dan masyarakat setempat.

Berdasarkan gambaran tersebut, maka dibutuhkan sebuah perencanaanfasiltasi dan koordinasi pelaksanaan pengembangannya, dengan tidak mengabaikan tujuan dan sasaran pengembangan kapet, Rencana Strategi jangka Panjang masing-masing daerah dan mengintegrasikan dengan isu percepatan dan perluasan yang mengacu pada pengembangan SDM, dan penciptaan Pusat Keunggulan Lokal (*local Centre for Excelen*).

Untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan, maka dukungan strategi dan arah pengembangan yang memudahkan untuk merumuskan agenda aksi yang disesuaikan dengan tahapan perencanaan yang telah ditentukan dalam dokumen perencanaan masing-masing melalui tiga pilar dan tiga daya dalam rangka mengoptimalkan potensi dan keunggulan daerah-daerah yang

ada dalam lingkup Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan memilih Kapet Parepare dan KEK di Kabupaten Barru sebagai bagian yang takterpisahkan dalam pengembangan ekonomi berbasis kawasan.

Berdasarkan integrasi dan kerangka desain tersebut dalam buku ini dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2 Kerangka Desain dan Integrasi
Pengembangan Ekonomi Berbasis Kawasan

Gambar tersebut mencerminkan adanya pertimbangan MP3EI untuk menjadi bagian dari percepatan Kawasan Strategis, baik KAPET maupun KEK. Selain itu didukung oleh strategi dan arah kebijakan melalui tiga daya dan tiga pilar, hingga sampai pada pendekatan yang dibutuhkan dalam percepatan pengembangan Kawasan. Antara lain :

1. Pendekatan Optimalisasi Percepatan Pengembangan Kawasan

Seiring dengan desain pengembangan kawasan ekonomi terpadu dan kawasan ekonomi khusus di wilayah Kapet Parepare dan Kabupaten Barru sebagai salah satu ditunjuk sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), masing-masing memiliki konsep pengembangan yang berbeda meskipun masih berada didalam wilayah yang sama. Berikut konsep pengembangan KAPET dapat dikemukakan sebagai berikut :

- (1) mengoptimalkan komoditas unggulan dengan jalan memperbanyak kapasitas industri olahan.

- (2) mengoptimalkan sebagai daerah sumber ternak bibit dan ternak potong nasional dan sebagai penghasil bahan baku industri pengolahan atau industri rakyat dengan berwawasan lingkungan.
- (3) mengembangkan potensi areal pertanian tanaman pangan, perkebunan peternakan, perikanan, hortikultura dan prospek pengembangan industri berbasis komoditas unggulan.
- (4) mempertahankan areal pertanian tanaman pangan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (5) mengoptimalkan kegiatan parawisata berbasis wisata alam di kawasan lindung (Bp.Kapet Parepare 2010)

Dengan sumber yang sama keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) diharapkan pengembangannya (1) meningkatkan penanaman modal melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis (2) memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor dan kegiatan ekonomi lainnya (3) mempercepat perkembangan daerah (4) sebagai model terobosan pengembangan kawasan untuk

pertumbuhan ekonomi, antarlain industri, parawisata, dan perdagangan, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja.

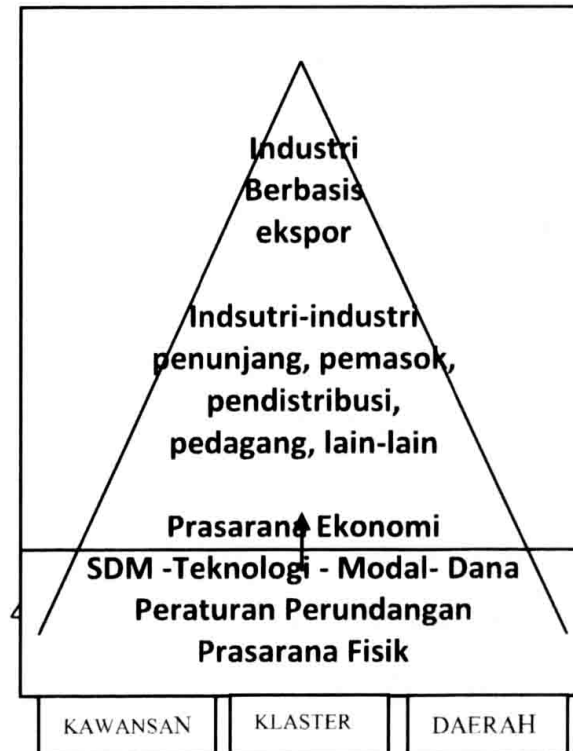
Baik Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) Parepare, maupun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan lainnya dalam percepatannya dapat seiring dengan Indonesia *Economic evelopment Corridors* (6 Koridor Pengembangan Ekonomi. Dalam Papres No.32/2011 menyatakan bahwa dalam Lokus Koridor ekonomi Sulawesi dengan kegiatan ekonomi utamanya adalah pertanian Pangan (Padi, Jagung, Kedelai, dan Ubi Kayu)Kakao, Perikanan,Nikel,Minyak dan Gas Bumi (Migas)

Berkaitan dengan koridor ini tentu akan menjadi bagian dari percepatan pengembangan ekonomi KAPET dan KEK dengan keberadaan MP3EI menjadi bagian percepatan dan yang memiliki kepastian hukum dan kepastian ekonomi untuk mempercepat dan mengembangkannya karena KAPET dan KEK adalah merupakan kawasan strategis yang dapat disinergikan, baik secara proporsional maupun secara profesional.

2. Pendekatan Percepatan Pengembangan Kawasan Berbasis Klaster.

Pengembangan dan percepatan kawasan ekonomi tentu memerlukan pendekatan dalam pengembangannya sesuai potensi kawasan dari berbagai sektor unggulan yang dimiliki maupun komoditas yang dihasilkan. Dalam mengoptimalkan potensi yang dimilikinya, maka salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan melalui pendekatan berbasis klaster. Pendekatan ini dimaksudkan untuk melibatkan stakeholder dalam rangka penguatan kelembagaan.

Le Maroc dalam Munir (2008) memaknai pendekatan klaster sebagai mesin penggerak ekonomi lokal. Lebih jauh diungkap bahwa suatu Klaster mempunyai tiga dimensi yang menyangkut Produsen pengeskor, pemasok dan perantara dan institusi dasar yang memberikan input, seperti ide, inovasi, modal dan prasarana



Integrated Cluster (Le Maroc, 1997) dimodifikasi :

Dengan pendekatan tersebut dapat dirancang dan disesuaikan dengan potensi KAPET maupun KEK serta kawasan lainnya. Kemudian mengaitkannya dengan program-program kemitraan yang dikembangkan oleh pihak kelembagaan lainnya, perbankan, pembiayaan, pemerintah dan program kemitraan lainnya. Hal ini menjadi penting untuk mempermudah mengakses apa yang menjadi kebutuhan

klaster, baik berupa permodalan, SDM dan kebijakan pemerintah untuk mengembangkan klaster yang berbasis sumber daya yang ada. Ajakan semua pihak untuk berupaya merumuskan langkah-langkah pengembangannya dengan masing-masing memiliki tugas dan fungsi, serta mengambil secara proporsional dan profesional misalnya perguruan tinggi tentu memiliki fungsi yang berkaitan dengan pengembangan SDM dan penguatan kelembagaannya. Kemudian *Civil Society Organization* (CSO) mempersiapkan metode pola-pola partisipatif yang akan dikembangkan dalam klaster yang ada, serta memfasilitas tumbuhnya kesadaran lokal untuk bersama menguatkan klaster dan bersama pemerintah mempromosikan klaster, mengidentifikasi permasalahan klaster yang ada, memilih klaster yang dianggap unggul dan berhasil menciptakan ekonomi berbasis partisipatif serta jejaring ekonomi yang luas, baik secara domestik maupun orientasi ekspor.

Keberadaan pembentukan klaster dalam lingkup kawasan juga diharapkan terciptanya sumber daya dan

teknologi yang dapat meningkatkan daya saing dari produk yang dihasilkan oleh klaster yang ada.

Pengembangan kawasan yang berkelanjutan dan bedaya saing tinggi, serta dapat memberi dampak pada penguatan ekonomi kawasan dan kesejahteraan masyarakat yang terlibat dalam pengembangan kawasan maupun di lingkaran kawasan, tentu mengacu pada rencana tataruang KAPET dan KEK sebagai kawasan strategis, maka ditetapkanlah pendekatan klaster sebagai berikut:

- a. Kabupaten Barru ditetapkan sebagai kawasan pengembangan perikanan tangkap.
- b. Kota Parepare sebagai pusat perdagangan dan pelayanan jasa serta pengembangan kawasan industri Parepare dan sekitarnya.
- c. Kabupaten Pinrang sebagai Pengembangan Minapolitan perikanan tambak
- d. Kabupaten Sidrap sebagai Kawasan Agropoltan pengembangan tanaman pangan dan ternak
- e. Kabupaten Enrekang sebagai kawasan Agropolitan pengembangan Hortikultural dan kopi.

Berkaitan dengan pembentukan klaster di masing-masing daerah, dapat dikembangkan kearah pengembangan industri olahan dan industri kreatif yang bertumpu pada sumber daya yang ada dalam kawasan yang ada. Hal ini juga merupakan pendekatan klaster masing-masing produk yang ada dalam kawasan masing-masing sepanjang berjalan bersama dengan keberadaan KAPET dan KEK dan kawasan lainnya, bahkan saling mendukung berkembangnya kawasan ini sebagai bagian yang turut mempengaruhi berkembangnya klaster yang diharapkan dapat menciptakan *multiplier effects*. Oleh karena itu klaster yang akan dikembangkan ini adalah industri berorientasi ekspor, karenanya komoditi yang dihasilkan sebagian langsung diekspor sebagian pula melalui proses untuk meningkatkan nilai tambah dan menamba devisa. Pengembangan industri berbasis sumber daya unggulan ini dan berorientasi ekspor, juga memiliki keterkaitan yang kuat dengan industri-industri penunjang, pemasok, pendistribusi, pedagang, serta didukung oleh sarana dan prasarana ekonomi berupa SDM

yang berpotensi , teknologi inovasi dan modal yang dimitrakan dengan perbankan, baik secara konvensional maupun secara syariah, dukungan regulasi dan peraturan berpihak kepada pengembangan klaster serta prasarana fisik. Pandangan yang diungkap Le Maroc ini sebetulnya sangat cocok dikembangkan untuk memperkuat keterkaitan kebelakang (*backward linkage*) maupun keterkaitan kedepan (*forward Linkage*) dalam Kawasan ekonomi Terpadu (KAPET) dan kawasan Ekonomi Khusus (KEK) serta kawasan lainnya yang selama ini belum secara maksimal menggunakan pola pendekatan *integrated*

Selain itu dengan pendekatan klaster ini hubungan memiliki keterkaitan yang sangat kuat antara komoditi yang dihasilkan dengan industri olahan yang akan dikembangkan, memperkuat kedudukan kawasan, apalagi jika klaster ini dikembangkan ke arah Pengembangan Industri Daerah (PID). maka bukan tidak mungkin industri berbasis sumber daya lokal kawasan ini akan berkembang dengan pertimbangan:

- (1) Memiliki ketersediaan input berupa bahan baku yang diperoleh dari komoditi unggulan dan secara berkesinambungan, sehingga keberadaan industri berbasis klaster ini memiliki prospek jangka panjang.
- (2) Berorientasi ekspor dengan jaringan yang kuat di pasar domestik maupun dipasar internasional
- (3). Menumbuhkan sektor-sektor lain berupa jasa khususnya dan sektor transportasi ,parawisata serta jasa perbankan dan pembiayaan lainnya.
- (4) Menciptakan tumbuhnya kerjasama antara lembaga berupa UMKM dan Koperasi yang terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif yang selama ini dikembangkan oleh masyarakat setempat maupun yang belum dikembangkan secara optimal.

Pegembangan Industri daerah berbasis klaster ini akan sangat berdampak pada penciptaan lapangan kerja, merangsang permintaan jasa domestik, serta meningkatkan pendapatan pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan industri klaster, serta meningkatkan pendapatan masyarakat,

pola percepatan dan pengembangan daerah pada kawasan kapet . Anataralin menjadi fungsi pelayanan dalam rangka memfasilitas pembentukan bisnis dan usaha baru yang akan dikembangkan oleh pelaku bisnis atau masyarakat sesuai keunggulan komoditi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Dalam rangka Pembentukan kelembagaan seperti ini diperlukan beberapa langkah, antara lain :

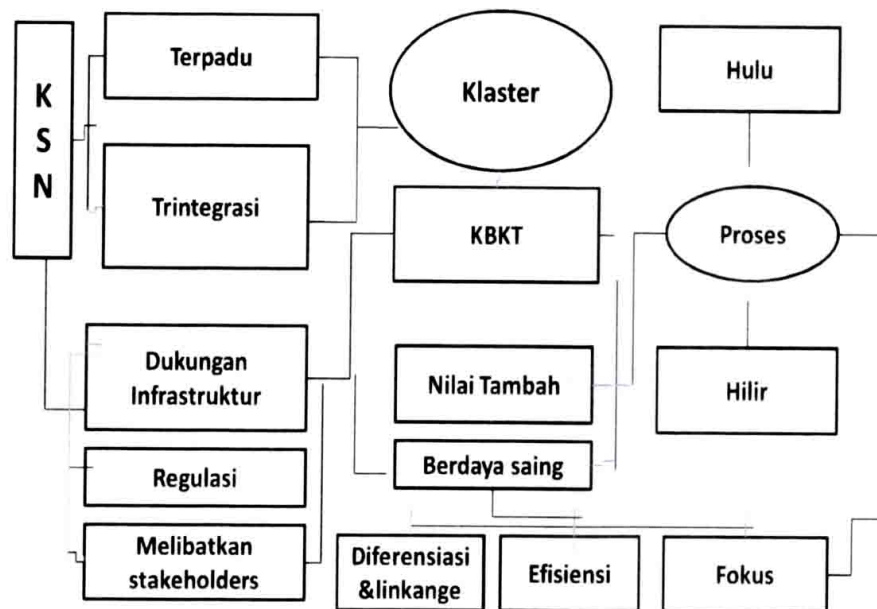
- (1) sosialisasi agar masyarakat dapat memahami peran dan fungsi keberadaanya sebagai langka inclution dan inovation lahirnya usaha baru berbasis unggulan.
- (2) menjadi sumber inisiasi pemanfaatan sumber daya lokal yang belum dikelola secara optimal
- (3) menjadi media pembentukan SDM yang memiliki keahlian dan profesionalisme yang tinggi yang bangun dari metode dan pendekatan pengembangan SDM yang menguasai perangkat teknologi, dan manajemen pengelolaan dimana melibatkan masyarakat dalam pengembangannya.

- (4) mendampingi masyarakat dan pelaku bisnis untuk menyusun kerangka pengembangan bisnis agar komoditi unggulan dapat dikembangkan kearah penciptaan nilai tambah yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pada klaster setempat, sehingga produk yang dihasilkan tidak hanya untuk produksi yang sifatnya gelondongan tetapi diarahkan pada pengembangan agroindustri yang memiliki turunan dengan spektrum yang lebih luas sesuai tuntutan pasar.
- (5) melatih masyarakat agar memiliki kemampuan untuk mengakses sumber daya produktif dan memiliki kemampun untuk merancang bisnis dengan perencanaan yang terarah, berkesinambungan dan terintegrasi dengan pola-pola pendekatan yang telah dirancang sebelumnya oleh pemerintah.
- (6) memperkenalkan kepada masyarakat tentang metode dan cara membuat bisnis plan dan studi kelayakan sederhana untuk memulai usaha dan mensinergikan

dengan lembaga pembiayaan, baik perbankan maupun lembaga lainnya dalam rangka penguatan struktur modal

- (7) mengarahkan masyarakat agar model Klinik Bisnis Kawasan Terpadu (KBKT) dijadikan sebagai wadah pengembangan masyarakat dan pusat pembinaan dan pengembangan inovasi produk unggulan sesuai klaster yang ada.

Pola Pengembangan Kawasan berbasis Klaster



Gambar 3.
Model Keterkaitan Pengembangan Klaster dan Klinik
Bisnis Kawasan Terpadu (KBKT)

BAB IV

POTENSI PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI BERBASIS UNGGULAN

A. Potensi Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Sejalan dengan Visi dan misi pembentukan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Parepae, dengan asas meningkatkan daya tarik kawasan, peningkatan sektor unggulan, peningkatan unggulan lokasi (posisi geografis dan ketersediaan prasarana wilayah) pemberdayaan kelembagaan, dan keterkaitan fungsional antara kawasan yang mendukung percepatan pembangunan ekonomi daerah di wilayah kawasan dan memberi kontribusi terhadap Perekonomian Sulawesi Selatan sebagai pilar pembangunan nasional.

1. Potensi Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Parepare.

Potensi dan arah pengembangan KAPET Parepare dalam pengembangannya akan tercipta keterkaitan sektor yang akan memperkuat kedudukan KAPET sebagai Pusat pengembangan ekonomi KTI. Karena itu arah pengembangan dari potensi dan keunggulan yang dimiliki dapat diuraikan berdasarkan tabel berikut.

Tabel 1
Ketersediaan Lahan Wilayah Kapet Pare-Pare

No	Nama	Ketersediaan Lahan
1	Kabupaten Barru	Berdasarkan identifikasi lahan di Kabupaten Barru, masih terdapat lahan yang sementara belum diusahakan seluas 34.930 Ha (45,32%) Berdasarkan penggunaannya, sedangkan penggunaan lahan lainnya adalah tanaman/ kayu 10.522 Ha (13,65%), sawah 11.519 Ha (14,94%), Tegal/ kebun 5.641 Ha (7,32 %), Ladang/ huma 4.407 Ha (5,72%), padang rumput 820 Ha (1,06%). Perkebunan 4.691 Ha (6,09%), pekarangan 1.796 Ha

No	Nama	Ketersediaan Lahan
		(2,33%) dan tambak / empang 2.751 Ha (3,57%).
		▪ Kecamatan Tanete Riaja: lahan yang belum diusahakan seluas 6.551 Ha, sedangkan yang telah dimanfaatkan seluas 5.067 Ha untuk tanaman/ kayu, tegalan/ kebun 1.143 Ha, sawah 2.083 Ha, ladang/huma 905 Ha dan lain-lain 1.720 Ha. ▪ Kecamatan Tanete Rilau: lahan yang belum diusahakan seluas 1.281 Ha, sedangkan yang telah dimanfaatkan seluas 590 Ha untuk tegalan/ kebun, tanaman/ kayu 2.984 Ha, sawah 1.963 Ha, tambak/ empang 521 Ha dan lain-lain 578 Ha. ▪ Kecamatan Barru: lahan yang belum diusahakan seluas 10.407 Ha, sedangkan yang telah dimanfaatkan

No	Nama	Ketersediaan Lahan
		seluas 2.625 Ha untuk sawah, tegal/ kebun 1.742 Ha, perkebunan 2.890 Ha, tambak/ empang 1.054 Ha dan lain-lain 1.214 Ha. ▪ Kecamatan Soppeng Riaja: lahan yang belum diusahakan seluas 2.254 Ha, sedangkan yang telah dimanfaatkan seluas 1.489 Ha untuk sawah, tanaman/ kayu 1.452 Ha, perkebunan 1.139 Ha, tegal/kebun 664 Ha dan lain-lain 892 Ha. ▪ Kecamatan balusu: lahan yang belum diusahakan seluas 542 Ha, sedangkan yang telah dimanfaatkan seluas 8.140 Ha untuk tegalan/ kebun, sawah 1.719 Ha, tambak/ empang 696 Ha, dan lain-lain 123 Ha. ▪ Mallusetasi: lahan yang belum diusahakan seluas 13.895 Ha,

No	Nama	Ketersediaan Lahan
		seluas 2.625 Ha untuk sawah, tegal/ kebun 1.742 Ha, perkebunan 2.890 Ha, tambak/ empang 1.054 Ha dan lain-lain 1.214 Ha. ▪ Kecamatan Soppeng Riaja: lahan yang belum diusahakan seluas 2.254 Ha, sedangkan yang telah dimanfaatkan seluas 1.489 Ha untuk sawah, tanaman/ kayu 1.452 Ha, perkebunan 1.139 Ha, tegal/kebun 664 Ha dan lain-lain 892 Ha. ▪ Kecamatan balusu: lahan yang belum diusahakan seluas 542 Ha, sedangkan yang telah dimanfaatkan seluas 8.140 Ha untuk tegalan/ kebun, sawah 1.719 Ha, tambak/ empang 696 Ha, dan lain-lain 123 Ha. ▪ Mallusetasi: lahan yang belum diusahakan seluas 13.895 Ha,

No	Nama	Ketersediaan Lahan
		sedangkan yang telah dimanfaatkan seluas 688 Ha untuk tegalan/ kebun, sawah 1.640 Ha, ladang/ huma 1.640 Ha, tegal/ kebun 688 Ha dan lain-lain 712 Ha.
2	Kabupaten Sidrap	Berdasarkan identifikasi lahan di Kabupaten Sidrap, masih terdapat lahan yang sementara belum diusahakan seluas 94.234 Ha (50,04%) dari luas wilayahnya. Lahan yang sementara belum termanfaatkan ini tersebar merata di sebelas kecamatan, dengan perincian Kecamatan Panca lautang (7.931 Ha), Tellu Limpoe (3.904 Ha), Watang Pulu (3.778 Ha), Baranti (313 Ha), Panca Rijang (212 Ha), Kulo (2.288 Ha), Maritengngae (65 Ha), Sidenreng (1.726 Ha), Dua pitue (806 Ha), Pitu Riawa (9.700 Ha) dan Pitu Riase (63.511 Ha). ▪ Kecamatan Panca lautang: lahan yang belum diusahakan seluas 7.931 Ha, sedangkan yang telah dimanfaatkan

No	Nama	Ketersediaan Lahan
		seluas 7.462 Ha untuk permukiman seluas 296 Ha, sawah seluas 3.845 Ha, kebun campur 94 Ha, ladang/ tegalan seluas 1.927 Ha (%), danau Sidenreng seluas 914 Ha, Zona luapan D. Sidenreng seluas 332 Ha, danau tempe 1.752 Ha, Zona luapan D. Tempe seluas 267 Ha, Rawa seluas 148 Ha dan lain-lain seluas 54 Ha. ▪ Kecamatan Tellu Limpoe: lahan yang belum diusahakan seluas 3.904 Ha, sedangkan yang telah dimanfaatkan seluas 6.416 Ha untuk permukiman seluas 262 Ha, sawah seluas 2.001 H), kebun campur 297 Ha, tegalan/ ladang 2.981 Ha, danau Sidenreng seluas 838 Ha, Zona luapan D. Sidenreng seluas 37 Ha, dan lain-lain seluas 37 Ha. ▪ Kecamatan Watang Pulu: lahan yang belum diusahakan seluas 3.778 Ha,

No	Nama	Ketersediaan Lahan
		sedangkan yang telah dimanfaatkan seluas 11.353 Ha untuk permukiman seluas 461 Ha, sawah seluas 3.559 Ha, perkebunan seluas 68 Ha, kebun campuran seluas 503 Ha, ladang/ tegalan seluas 6.762 Ha dan lain-lain seluas 90 Ha. ▪ Kecamatan Baranti: lahan yang belum diusahakan seluas 313 Ha, sedangkan yang telah dimanfaatkan seluas 5.076 Ha untuk permukiman seluas 495 Ha, sawah seluas 3.643 Ha, perkebunan seluas 50 Ha, kebun campuran seluas 503 Ha dan ladang/ tegalan seluas 735 Ha. ▪ Kecamatan Panca Rijang: lahan yang belum diusahakan seluas 212 Ha, sedangkan yang telah dimanfaatkan seluas 3.190 Ha untuk permukiman

No	Nama	Ketersediaan Lahan
		seluas 272 Ha, sawah seluas 1.506 Ha, kebun campuran seluas 547 Ha, dan ladang/ tegalan seluas 865 Ha. ▪ Kecamatan Kulo: lahan yang belum diusahakan seluas 2.288 Ha, sedangkan yang telah dimanfaatkan seluas 5.212 Ha untuk permukiman seluas 271 Ha, sawah seluas 2.836 Ha, kebun campuran seluas 332 Ha dan ladang/ tegalan seluas 1.773Ha. ▪ Kecamatan Maritengngae: lahan yang belum diusahakan seluas 65 Ha, sedangkan yang telah dimanfaatkan seluas 6.525 Ha untuk permukiman seluas 680 Ha, sawah seluas 5.395 Ha, kebun campuran seluas 262 Ha, dan ladang/ tegalan seluas 68 Ha. ▪ Kecamatan Sidenreng: lahan yang belum diusahakan seluas 1.726 Ha,

No	Nama	Ketersediaan Lahan
		sedangkan yang telah dimanfaatkan seluas 10.355 Ha untuk permukiman seluas 368 Ha, sawah seluas 7.501 Ha, perkebunan seluas 71 Ha, kebun campuran seluas 108 Ha, ladang/tegalan seluas 2.310 Ha, danau Sidenreng seluas 1.013 Ha dan Zona luapan D. Sidenreng seluas 18 Ha. ▪ Kecamatan Dua Pitue: lahan yang belum diusahakan seluas 806 Ha, sedangkan yang telah dimanfaatkan seluas 6.193 Ha untuk permukiman seluas 312 Ha, sawah seluas 5.157 Ha, perkebunan seluas 160 Ha, kebun campuran seluas 318 Ha dan ladang/tegalan seluas 246 Ha. ▪ Kecamatan Pitu Riawa: lahan yang belum diusahakan seluas 9.700 Ha, sedangkan yang telah dimanfaatkan

No	Nama	Ketersediaan Lahan
		sedangkan yang telah dimanfaatkan seluas 10.355 Ha untuk permukiman seluas 368 Ha, sawah seluas 7.501 Ha, perkebunan seluas 71 Ha, kebun campuran seluas 108 Ha, ladang/tegalan seluas 2.310 Ha, danau Sidenreng seluas 1.013 Ha dan Zona luapan D. Sidenreng seluas 18 Ha. ▪ Kecamatan Dua Pitue: lahan yang belum diusahakan seluas 806 Ha, sedangkan yang telah dimanfaatkan seluas 6.193 Ha untuk permukiman seluas 312 Ha, sawah seluas 5.157 Ha, perkebunan seluas 160 Ha, kebun campuran seluas 318 Ha dan ladang/tegalan seluas 246 Ha. ▪ Kecamatan Pitu Riawa: lahan yang belum diusahakan seluas 9.700 Ha, sedangkan yang telah dimanfaatkan

No	Nama	Ketersediaan Lahan
		seluas 11.343 Ha untuk permukiman seluas 349 Ha, sawah seluas 5.199 Ha, kebun campuran seluas 197 Ha dan ladang/ tegalan seluas 5.598 Ha. ▪ Kecamatan Pitu Riase: lahan yang belum diusahakan seluas 63.551 Ha, sedangkan yang telah dimanfaatkan seluas 20.966 Ha untuk permukiman seluas 195 Ha, sawah seluas 2.873 Ha, perkebunan seluas 1.195 Ha, kebun campuran seluas 59 Ha, ladang/ tegalan seluas 15.736 Ha, Bendungan Kalola seluas 438 Ha, Zona luapan Bendungan Kalola seluas 5 Ha, dan sungai seluas 465 Ha (%).
3	Kabupaten Pinrang	Berdasarkan identifikasi lahan di Kabupaten Pinrang, masih terdapat lahan yang sementara belum diusahakan seluas 95.704.3 Ha (48,78%) dari luas wilayahnya. Lahan yang sementara belum termanfaatkan

No	Nama	Ketersediaan Lahan
		ini tersebar merata di dua belas kecamatan, dengan perincian Kecamatan Suppa (3.782,3 Ha), Mattiro sompe (3.530,2 Ha), Lanrisang (17,2 Ha), Mattiro Bulu (2.552,3 Ha), Watang Sawitto (7,9 Ha), Patampanua (1368,2 Ha), Cempa (8,9 Ha), Duampanua (9.471,5 Ha), Lembang (63.216,2 Ha), Paleteang (27,1 Ha), Tiroang (11,3 Ha) dan Batu Lappa (11.621,2 Ha). ▪ Kecamatan Suppa: lahan yang belum diusahakan seluas 3.872,3 Ha, sedangkan yang telah dimanfaatkan seluas 3.547,7 Ha. ▪ Kecamatan Mattiro Sompe: lahan yang belum diusahakan seluas 3.530,2 Ha, sedangkan yang telah dimanfaatkan seluas 6.168,8 Ha diantaranya 1.851,3 hektar untuk ladang/regalan, tambak 1.645,7 hektar dan mangrove yang mencapai 50,7 hektar.

No	Nama	Ketersediaan Lahan
		▪ Kecamatan Lanrisang: lahan yang belum diusahakan seluas 17,2 Ha, sedangkan yang telah dimanfaatkan seluas 7.283,8 Ha diantaranya 4.215,5 Ha sawah, kebun campur 378,6 Ha, ladang/ tegalan 7,2Ha, perkebunan 527,5 Ha, tambak 1.785,9 Ha dan sungai 30,8 Ha. ▪ Kecamatan Mattiro Bulu: lahan yang belum diusahakan seluas 2.552,3 Ha, sedangkan yang telah dimanfaatkan seluas 10.696,7 Ha diantaranya 5.994,0 Ha untuk sawah, kebun campur 625,9 Ha, ladang/ tegalan 2.281,7 Ha, perkebunan 1.269,4 Ha, tambak 11,2 Ha, dan sungai 54,8 Ha. ▪ Kecamatan Watang Sawitto: lahan yang belum diusahakan seluas 7,9 Ha, sedangkan yang telah dimanfaatkan

No	Nama	Ketersediaan Lahan
		seluas 5.889,1 Ha diantaranya 4.651,7 Ha untuk sawah, kebun campur 512,0 Ha dan perkebunan 134,8Ha. ▪ Kecamatan Patampanua: lahan yang belum diusahakan seluas 1.368,2 Ha, sedangkan yang telah dimanfaatkan seluas 12.316,8 Ha diantaranya 8.307,8 Ha untuk sawah, kebun campur 2.317,6 Ha, Ladang/Tegalan 408,2 Ha, perkebunan 467,5 Ha dan Sungai 256,7 Ha. ▪ Kecamatan Cempa: lahan yang belum diusahakan seluas 8,9 Ha, sedangkan yang telah dimanfaatkan seluas 9.021,1 Ha diantaranya 5.052,3 Ha untuk sawah, kebun campur 483,3 Ha, Ladang/Tegalan 12,1 Ha, perkebunan 823,7 Ha, Tambak 2.117,3 Ha dan Sungai 254,2 Ha.

No	Nama	Ketersediaan Lahan
		▪ Kecamatan Duampanua: lahan yang belum diusahakan seluas 9.471,5 Ha, sedangkan yang telah dimanfaatkan seluas 19.714,5 Ha diantaranya 6.636,3 Ha sawah, kebun campur 1.345,0 Ha, Ladang/Tegalan 3.861,5 Ha, perkebunan 1.182,7 Ha, Tambak 5.191,0 Ha dan Sungai 844.0 Ha. ▪ Kecamatan Lembang: lahan yang belum diusahakan seluas 63.216,2 Ha, sedangkan yang telah dimanfaatkan seluas 10.092,8 Ha diantaranya 2.102,7 Ha untuk sawah, kebun campur 1.279,1 Ha, Ladang/Tegalan 5.090,3 Ha, perkebunan 278,1 Ha, Tambak 182,4 Ha dan Sungai 595,4 Ha. ▪ Kecamatan Paleteang: lahan yang belum diusahakan seluas 27,1 Ha,

No	Nama	Ketersediaan Lahan
		sedangkan yang telah dimanfaatkan seluas 7.745,9 Ha diantaranya 5.479,7 Ha untuk sawah, kebun campur 257,5 Ha, perkebunan 1.615,5Ha dan sungai 18,8 Ha. ▪ Kecamatan Tiroang: lahan yang belum diusahakan seluas 11,3 Ha, sedangkan yang telah dimanfaatkan seluas 3.717,7 Ha diantaranya 2.205,6 Ha untuk sawah, kebun campur 88,1 Ha, perkebunan 1.139,9 Ha, tambak 5,6 Ha , dan sungai 20,7 Ha. ▪ Kecamatan Batu lappa: lahan yang belum diusahakan seluas 11.621,2 Ha, sedangkan yang telah dimanfaatkan seluas 4.277,8 Ha diantaranya 870,8 Ha untuk sawah, kebun campur 567,8 Ha, Ladang/Tegalan 2.417,4 Ha dan Tambak 276,8 Ha .

No	Nama	Ketersediaan Lahan
4	Kabupaten Enrekang	Berdasarkan identifikasi lahan di Kabupaten Enrekang, masih terdapat lahan yang sementara belum diusahakan seluas 73.210 Ha (40,99%) dari luas wilayahnya. Lahan yang sementara belum termanfaatkan ini tersebar merata di sembilan kecamatan. ▪ Kecamatan Maiwa: potensi lahan pertanian seluas 8.512 Ha, sedangkan yang telah dimanfaatkan seluas 1.842 Ha sehingga peluang untuk pengembangannya masih tersisa 6.670 Ha. ▪ Kecamatan Enrekang: potensi lahan pertanian seluas 15.645 Ha, sedangkan yang telah dimanfaatkan seluas 220 Ha, sehingga peluang pengembangannya masih tersisa 15.425 Ha. ▪ Kecamatan Baraka: potensi lahan pertanian seluas 10.990 Ha,

No	Nama	Ketersediaan Lahan
		sedangkan yang telah dimanfaatkan seluas 482 Ha, sehingga peluang pengembangannya masih tersisa 10.508 Ha. ▪ Kecamatan Anggeraja: potensi lahan pertanian seluas 8.853 Ha, sedangkan yang telah dimanfaatkan seluas 200 Ha, sehingga peluang untuk pengembangannya masih tersisa 8.653 Ha. ▪ Kecamatan Alla: potensi lahan pertanian seluas 5.904 Ha, sedangkan yang telah dimanfaatkan seluas 406 Ha, sehingga peluang untuk pengembangannya masih tersisa 5.498 Ha. ▪ Kecamatan Bungin: potensi lahan pertanian seluas 9.800 Ha, sedangkan yang telah dimanfaatkan seluas 533

No	Nama	Ketersediaan Lahan
		Ha, sehingga peluang untuk pengembangannya masih tersisa 9.267 Ha. ▪ Kecamatan Cendana: potensi lahan pertanian seluas 4.972 Ha, sedangkan yang telah dimanfaatkan seluas 392 Ha, sehingga peluang untuk pengembangannya masih tersisa 4.580 Ha. ▪ Kecamatan Curio: potensi lahan pertanian seluas 9.341 Ha, sedangkan yang telah dimanfaatkan seluas 1.266 Ha, sehingga peluang untuk pengembangannya masih tersisa 8.075 Ha. ▪ Kecamatan Malua: potensi lahan pertanian seluas 5.012 Ha, sedangkan yang telah dimanfaatkan seluas 478 Ha, sehingga peluang untuk

No	Nama	Ketersediaan Lahan
		pengembangannya masih tersisa 4.534 Ha.
5	Kota Parepare	Berdasarkan identifikasi lahan di Kota Parepare, masih terdapat lahan yang sementara belum diusahakan seluas 3.373 Ha (33.95%) dari luas wilayahnya. Lahan yang sementara belum termanfaatkan ini tersebar merata di tiga kecamatan, dengan perincian Kecamatan Ujung (274,50 Ha), Soreang (177,23 Ha), dan Bacukiki (2.921,60 Ha). ▪ Kecamatan Ujung: lahan yang belum diusahakan seluas 274,50 Ha, sedangkan yang telah dimanfaatkan seluas 855,50 Ha dan 1,75 Ha kawasan reklamasi. Areal permukiman yang paling luas terdapat di wilayah Kelurahan Lapadde, yaitu mencapai 107,56 hektar atau setara 10,78% dari total luas wilayah Kecamatan Ujung. Di

No	Nama	Ketersediaan Lahan
		Wilayah Kelurahan Lapadde terdapat beberapa areal perumahan , seperti lapadde Mas dan Pepabri. Sementara itu, luas Permukiman Di Kelurahan Labukkang Berjumlah 56,48 hektar (4,81 %). Areal Sawah di Kecamatan Ujung Seluruhnya berada di Wilayah Kelurahan Lapadde yaitu sebanyak 167,64 hektar (=16,77%). Di seluruh kelurahan terdapat kawasan pertokoan , namun bervariasi tingkat keramaian dan luasnya. ▪ Di Kecamatan Ujung terdapat pelabuhan Nusantara yang beroperasi secara nasional dan Internasional. Di samping itu, terdapat tempat pembuangan akhir sampah yang mencapai luas 4,14 hektar (=0,37%) yang terletak di kelurahan Lapadde.

No	Nama	Ketersediaan Lahan
		▪ Kecamatan Soreang: lahan yang belum diusahakan seluas 177,23 Ha, sedangkan yang telah dimanfaatkan seluas 655,77 Ha dinataranya 44,86 hektar yang setara dengan 5,39% dari total luas wilayah Kecamatan Soreang. Salah satu kantor yang memiliki areal cukup luas adalah kantor Lapan (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional) di kelurahan bukit harapan dengan total luas areal 4,5 hektar. Penggunaan lahan untuk kawasan pendidikan berjumlah 25,92 hektar (3,11%) yang terdiri dari tingkat pendidikan taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. ▪ Penggunaan lahan untuk areal tambak di Kecamatan Soreang mencapai 21,20 hektar (2,54%) yang terutama berlokasi di wilayah Kelurahan Watang

No	Nama	Ketersediaan Lahan
		Soreang. Di kelurahan Bukit Harapan terdapat Hutan Kota Jompie yang cukup luas. Hutan Kota tersebut merupakan merupakan paru-paru kota dan merupakan salah satu tempat rekreasi di Kota Parepare. ▪ Kecamatan Bacukiki: lahan yang belum diusahakan seluas 2921,60 Ha, sedangkan yang telah dimanfaatkan seluas 5.048,40 Ha diantaranya 4 areal tambak 95,64 hektar (=1,20%) dan areal perkebunan 478,25 hektar (=6,00%). Areal sawah di wilayah kota Parepare sebagian besar terdapat di Wilayah Kecamatan Bacukiki, yaitu mencapai 942,47 hektar (=1,85%). Areal sawah tersebut tersebar hampir di setiap kelurahan, kecuali di kelurahan Sumpang Minangae, Cappa Galung dan Kampung Baru.

No	Nama	Ketersediaan Lahan
		Areal sawah di wilayah Kecamatan Bacukiki yang paling luas terdapat di Kelurahan Lemoe (396,23 hektar), Kelurahan Lompoe (230,44 hektar) dan dai Kelurahan Wattang Bacukiki (223,71 hektar). ▪ Areal permukiman di wilayah Kecamatan Bacukiki mencapai luas 390,73 hektar (=4,90%),sebaran areal permukiman yang cukup nluas terdapat di Wilayah Kelurahan Lumpue, Lemoe, Lompoe, Bumi harapan dan Tiro Sompe, Masing masing mencapai lebih dari 50 hektar..

Sumber : BP. Kapet Parepare, (2012)

Selain arah dan pengembangan KAPET Parepare yang akan dikembangkan, maka untuk memudahkan mengoptimalkan potesi dari komoditi yang dimiliki daerah dalam lingkup Kawasan, dapat dikembangkan melalui strategi focus masing-masing dilihat dalam tabel 2.

Tabel.2
Komoditas Unggulan yang Dikembangkan
KAPET Parepare

No	Komoditi	Lokasi/kabupaten	
		Utama	Pendukung
1	Padi	Sidrap	Pinrang
			Barru
2	Kopi	Enrekang	Pinrang
			Sidrap
3	Holtikultura	Enrekang	Barru
			Pinrang
			Sidrap
4	Perikanan tangkap	Barru	Pare-pare
			Pinrang
5	Perikanan tambak	Pinrang	Barru
6	Sapi	Sidrap	Enrekang
			Barru
			Pinrang

Sumber :BP. Kapet Parepare, (2012)

Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan bahwa KAPET Parepare memiliki keunggulan tersendiri dan berpotensi menjadi daerah pengsupply. Kemudian enam komoditi masing-masing daerah fokus mengembangkannya keraha terciptanya Pusat industri Komoditi Unggulan (PKU) KAPET yang tidak hanya untuk memberi nilai tambah tetapi juga berorientasi ekspor, menciptakan lapangan kerja dan merangsang kegiatan ekonomi masyarakat dari proses pengelolaan enam komoditi yang dijadikan sebagai klaster unggulan terpadu di KAPET Parepare .Selain itu mendukung pengembangan enam komoditi yang telah diklasterkan berdasarkan potensi kabupaten yang ada dengan pola integrated antara pengembangan kawasan dengan usaha tani, industri yang berdampak luas bagi tumbuhnya usaha baru dan penciptaan lapangan usaha baru , serta daerah dengan komoditi unggulan masing-masing dimana KAPET sebagai penggerak proses percepatan, dan peningkatan nilai tambah meningkatkan pendapat masyarakat.

B. Potensi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Negara-negara yang telah berhasil dan memperoleh manfaat dan keuntungan ekonomi dengan adanya Kawasan Ekonomi Khusus, seperti di China (Shanzen), India (kandia), Malaysia (Penang) dan Philipina (Getway Busniness park)Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Keberhasilan mengembangkan potensi yang ada di KEK didasarkan pada kemampuan melakukan ekspor dan menciptakan daya saing. Selain itu juga didukung oleh infrastruktur dan kemampuan mengakses pasar.

Kabupaten Barru ditunjuk sebagai sala satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan juga berada dalam lingkup KAPET Parepare diharapkan mmenjadi pusat pertumbuhan baru dengan potensi dan keunggulan yang akan dikembangkan Eco Industri Park Garongkong, yang merupakan pusat produksi dan pengelolaan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan nasional. Kemudian dimasa depan akan memaksimalkan kegiatan industri yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan berorientasi ekspor .

Melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Baik secara terpadu maupun kawasan khusus dalam buku ini

mengungkap keunggulan daerah wilayah kawasan yang prospektif sebagai berikut:

Kabupaten Barru memiliki komoditas unggulan yang dapat dikembangkan sehingga dapat direalisasikan sebagai pusat-pusat ekonomi yang andal dengan tetap bertumpu pada keunggulan komoditas dan infrastruktur, tanpa mematikan atau melemahkan wilayah lainnya ataupun menghilangkan identitas wilayah dan menggantinya dengan identitas wilayah lain sehingga pada akhirnya mengutamakan terbentuknya saling memperkuat antar daerah dalam suatu rangkaian yang simbiose mutualistik. Adapun peluang investasi yang dapat dikembangkan adalah terciptanya Industri Perikanan Terpadu. Pemilihan Kabupaten Barru sebagai basis industri perikanan didasarkan pada komoditas unggulan Kabupaten Barru yang tersebar pada sector pertanian khususnya perikanan .

Selain itu dukungan Pelabuhan Garongkong Letak geografis yang sebagian besar berada di wilayah pesisir pantai dan memiliki gugusan pulau-pulau memberikan peluang bagi kabupaten Barru sebagai daerah pengembangan pelabuhan dan industri maritim. Disamping itu wilayahnya yang relatif berbatasan lebih dekat dengan pulau Kalimantan memberikan

peluang yang sangat strategis kabupaten Barru untuk pembangunan pelabuhan Garongkong.

Di samping itu semakin padatnya pelabuhan Makassar, maka pelabuhan Garongkong akan menjadi pelabuhan alternatif bagi penumpang yang menuju pelabuhan Batulicin. Sebagai daerah yang termasuk dalam Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Parepare dan memiliki daerah penyangga (hinterland) seperti, kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, Kabupaten Pangkep. Secara ekonomi akan menguntungkan Pelabuhan Garongkong untuk mempercepat pergerakan transportasi barang dan jasa yang keluar dan masuk melalui Pelabuhan Garongkong.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH BERBASIS KAWASAN

A. Strategi Pengembangan

Berdasarkan Pendekatan analisis pengembangan ekonomi berbasis kawasan kemudian dalam mengoptimalkan potensi dan keunggulan yang dimiliki daerah dalam lingkup kawasan tersebut, maka diperlukan strategi yang efektif dengan melalui penajaman strategi untuk mencapai tujuan KAPET sebagai kawasan cepat tumbuh dan berkembang memberi dampak kuatnya perekonomian nasional dan regional, serta mampu mengatasi kecenderungan ekonomi yang semakin kompetitif yakni dengan melalui strategi Tiga Pilar dan Tiga Daya :

1. Strategi Penguatan Kelembagaan

Penguatan kelembagaan ekonomi lingkup KAPET berupa pelibatan stakeholders dalam proses pengembangannya, penguatan klaster ekonomi terpadu dan terintegrasi dengan pola pengembangan yang telah dirancang didalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD) dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengembangan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang berkaitan dengan penajaman program strategis KAPET dan KEK secara simultan dan bersifat komplementer.

2. Membangun sinergitas dan kemitraan yang kuat.

Dimaksudkan untuk memperluas jaringan usaha dan kemitraan mendukung percepatan pengembangan kawasan T sebagai pusat pertumbuhan baru. Dengan pola ini posisi KAPET dan KEK dengan peran masing-masing terintegrasi dalam satu kesatuan pengembangan. Dengan kemitraan yang kuat produk unggulan dan klaster industri yang dikembangkan semakin memiliki pangsa pasar yang lebih luas,

sehingga industri yang dikembangkan semakin berkesinambungan dan komoditi unggulan semakin mendorong usaha masyarakat pada lingkup KAPET memiliki posisi tawar yang kuat. Selain itu Kemitraan juga didukung oleh kerjasama antara daerah antara pelaku bisnis untuk saling menguatkan, sehingga memberi manfaat ekonomi dan sosial dapat dirasakan manfaatnya secara bersama terutama menciptakan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Menciptakan Iklim Investasi yang kondusif.

Strategi ini diharapkan tercipta iklim yang merasangi tumbuhnya daya tarik melalui kemudahan, dan stabilitas terjamin bagi dunia usaha, regulasi yang berpihak kepada kepentingan aktivitas dan program strategis KAPET dan KEK yang terkait dengan kepentingan masyarakat dan dunia usaha. Dengan suasana harmoni, memberi keuntungan dan mengurangi resiko dengan dukungan investasi akan menciptakan *multiplier effect* yang lebih luas.

Selain itu strategi yang ditempuh dalam pengembangan KAPET dan KET juga didukung oleh tiga daya sebagai penguat tiga pilar yakni. (1) daya dukung pengembangan ekonomi kawasan memerlukan dukungan investasi , regulasi dan infrastruktur, serta *stakeholder* untuk terlibat dalam proses pengembangan ekonomi berbasis kawasan (2) menciptakan daya tarik tidak hanya dengan keunggulan yang dimiliki oleh kawasan, tetapi kemampuan meningkatkan daya tarik semua pihak melihat kawasan strategis ini sebagai pusat pengembangan ekonomi bersama, pengembangan SDM dan peningkatan kualitas produksi melalui inovasi teknologi yang makin maju. Serta (3) peningkatan daya saing melalui pengelolaan manajemen kawasan secara efisien dan dikelola secara profesional dalam rangka menjaga kesinambungan usaha.

B. Arah Pengembangan dan Implikasi Kebijakan Berbasis Kawasan

1. Arah Pengembangan

Berdasarkan potensi yang ada, yang didukung dengan strategi yang efektif, maka arah pengembangannya dapat disesuaikan dengan potensi dan keunggulan masing-masing daerah yang ada dalam lingkup kawasan, maka pengembangan ekonomi berbasis kawasan dapat diimplementasikan melalui arah pengembangan dengan kemampuan mengoptimalkan potensi dan keunggulan yang ada, menjadikan kapet sebagai pusat pembibitan dan industri berbasis masyarakat. Kemudian mengoptimalkan potensi dengan inovasi teknologi dan SDM serta mengarahkan komoditi unggulan menjadi input pengembangan industri daerah yang berdaya saing kuat. Berdasarkan arah umum pengembangan kawasan focus pada pengembangan kawasan berbasis unggulan dapat dilihat pada table berikut.

Tabel.3

Arah pengembangan KAPET Parepare

No.	Nama Kabupaten / Kota	Arahan Pengembangan
1	Kabupaten Barru	Merupakan pusat industri perikanan terpadu dan Pelabuhan Garongkong. Industri perikanan terpadu ini direncanakan merupakan keterkaitan beberapa fasilitas sektor perikanan dengan industri/pabrik yang berbasis pengolahan hasil perikanan, sehingga diperoleh keterpaduan baik dari sisi jaringan kerja/hubungan antar fasilitas. Fasilitas industri perikanan terpadu sangat didukung dengan keberadaan fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa, sehingga investasi pabrik tidak lagi memerlukan fasilitas pendukung, seperti: dermaga, bengkel perahu, pangkalan BBM, dan pabrik es, karena semua fasilitas tersebut telah disiapkan di PPI.

No.	Nama Kabupaten / Kota	Arahan Pengembangan
2	Kabupaten Sidrap	Merupakan pusat Padi dan Unggas. Kabupaten ini terpilih sebagai pusat padi dan unggas, disamping karena didukung oleh factor produksi juga karena pertimbangan bahwa daerah ini sudah merupakan konsentrasi kegiatan industri di Kabupaten Sidrap khususnya industri penggilingan padi dan peternakan unggas khususnya ayam petelur sehingga penentuan pusat ini mengikuti pola yang telah ada sekarang, dimana pemanfaatan aksesibilitas transportasi dan kemudahan infrastruktur relatif dominan sebagai daya tarik bagi pelaku ekonomi, disamping ketersediaan bahan baku dan tenaga kerja relatif tersedia dan mencukupi.
3	Kabupaten Pinrang	Merupakan pusat kakao dan padi. Kabupaten ini terpilih sebagai pusat kakao, disamping karena didukung

No.	Nama Kabupaten / Kota	Arahan Pengembangan
		oleh faktor produksi juga karena pertimbangan bahwa daerah ini termasuk dalam program "GERBANG EMAS" dimana salah satu produk yang akan dikembangkan adalah kakao yang meliputi beberapa kabupaten diantaranya Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Pinrang, dan Kabupaten Luwu. Dengan produksi biji kakao dari sentra kakao di Sulawesi Selatan lainnya yang merupakan daerah hinterland KAPET parepare seperti di Kabupaten Luwu, Luwu Timur dan Bone dirasakan mampu untuk mensuplai industri pengolahan kakao dengan kapasitas produksi 15.000 ton/tahun yang direncanakan akan dibangun di Kabupaten Pinrang yang juga merupakan salah satu sentra kakao di Sulawesi Selatan.

No.	Nama Kabupaten / Kota	Arahan Pengembangan
		Kabupaten Pinrang memiliki potensi pertanian terutama tanaman padi yang cukup besar. Kabupaten Pinrang dapat menjadi lumbung beras bagi ketahanan pangan di wilayah KAPET Parepare dan sekitarnya.
4	Kabupaten Enrekang	Merupakan pusat agro wisata dan terminal agro. Kabupaten ini terpilih karena produk hortikultura Kabupaten Enrekang memiliki potensi untuk dikembangkan selain menjadi komoditas unggulan ekspor juga sangat prospek untuk dikembangkan menjadi wisata agro. Keunggulan komparatif dari wisata agro antara lain karena lokasi Kabupaten Enrekang yang berdampingan dengan Kabupaten tana Toraja yang merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia, dan Sulawesi Selatan pada khususnya.

No.	Nama Kabupaten / Kota	Arahan Pengembangan
		Terpilihnya Kabupaten Enrekang sebagai pusat terminal agro karena hingga saat ini pasar yang cukup besar bagi Kabupaten Enrekang sebagai pusat produksi hortikultura adalah daerah Kalimantan Timur. Namun Produk pertanian yang diangkut telah mengalami kerusakan yang cukup besar yang dirata-rata sekitar 40% sehingga hasil yang dapat dijual atau sampai ke pembeli tidak maksimal. Sementara biaya yang dikeluarkan untuk mengangkut barang ini tidak murah. Sehingga perlu dilakukan pembenahan pada proses pasca panen dan pengangkutan diantaranya dengan menempatkan terminal agro.
5	Kota Parepare	merupakan pusat untuk kawasan industri dan pelabuhan. Kota ini terpilih karena Dukungan potensi, posisi dan

No.	Nama Kabupaten / Kota	Arahan Pengembangan
		letak Kota Parepare yang demikian strategis dengan fasilitas pelabuhan alamnya akan meningkatkan fungsinya sebagai kota jasa dan pengumpul hasil-hasil wilayah sekitarnya dengan adanya kawasan industri dengan berbagai fasilitasnya.

Sumber : BP Kapet 2012

Berkaitan dengan table yang menggambarkan arah pengembangan asing-masing daerah yang ada dalam kawasan, baik KAPET maupun KEK melalui optimalisasi peran dan fungsi sebagai berikut.

1. Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) secara melembaga memiliki peran yang cukup besar dalam mempercepat akselerasi pertumbuhan daerah pada Kawasan tersebut, dengan harapan dengan skenario pengembangan dan strategi serta kebijakan yang telah dituangkan dalam pengembangannya dapat

dijalankan dengan sungguh-sungguh oleh setiap daerah secara simultan.

2. Kawasan tersebut adalah kawasan unggul baik dilihat dari sisi sumber daya alamnya maupun komoditi yang dihasilkannya, namun sumber daya yang unggul tidak akan dapat menghasilkan komoditi yang unggul, bernilai tambah dan berdaya saing kuat jika tidak didukung oleh Pengembangan Industri Daerah (PID) pada satu klaster tertentu. Karena itu Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) sangat strategis untuk menjadi pusat pengelolaan industri daerah berbasis keunggulan dan mendukung alih teknologi, menciptakan lapangan kerja dan, dan meningkatkan skala ekonomi dan kualitas produk yang bernilai jual baik untuk kebutuhan domestik maupun untuk orientasi ekspor
3. Kekuatan dan ancaman dapat diatasi dengan memperkuat kelembagaan ekonomi pada setiap daerah, serta mengoptimalkan potensi kawasan agar mengalami pertumbuhan dan memperkuat struktur ekonomi dan

menyerap lapangan kerja untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

4. Para investor baik dalam negeri maupun luar negeri akan tertarik menanamkan modalnya jika didukung oleh stimulus fiskal dan infrastruktur menjangkau lokasi yang unggul pada daerah wilayah kawasan, baik Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) maupun Kawasan Khusus Ekonom (KEK)

2. Implikasi Kebijakan.

Melalui pendekatan konsep dan pendekatan yang dikembangkan melalui potensi dan keunggulan serta arah pengembangan KAPET dan KEK, serta KNM di masa depan, maka dalam pengembangannya dibutuhkan kebijakan yang berpihak pada pengembangan khususnya KAPET dan KEK sebagai Kawasan Strategis Nasional yang strategis mendorong percepatan pembangunan, baik secara nasional, regional dan mengantisipasi kecenderungan global. Langkah-langkah kebijakan yang efektif dilakukan adalah.

1. Pengembangan kawasan strategis ini dibutuhkan komitmen yang kuat dari pusat maupun pemerintah daerah yang ada dalam lingkup kawasan. Kemudian meningkatkan pola Koordinasi dari pusat ke Kapet dan Pusat ke SKPD dan SKPD ke KAPET atau KAPET ke SKPD memerlukan koordinasi dan sinkronisasi untuk mempertajam kesatuan Visi dan Misi, serta fungsi dalam mengembangkan potensi daerah berbasis
2. Mendorong regulasi yang tepat untuk memberi kemudahan bagi para investor luar maupun pengusaha lokal untuk mengoptimalkan potensi dan keunggulan masing-masing daerah yang ada dalam kawasan
3. Mengintegrasikan program strategis yang bersifat nasional disesuaikan dengan konsep perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan jangka pendek, serta penyesuaian terhadap keberadaan koridor ekonomi sesuai Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
4. Meningkatkan fasilitas dan infrastruktur yang memadai dalam rangka memperlancar arus perdagangan

barang dan jasa, serta mendukung penguatan ekonomi lokal agar tumbuh bersama dengan aktivitas kawasan yang didukung oleh program strategis nasional ke daerah secara proporsional.

5. Revitalisasi fungsi KAPET dan penguatan KEK mendorong ekonomi lokal dengan potensi yang ada melalui penciptaan iklim investasi, peningkatan daya tarik dan daya saing agar para investor tertarik mengembangkan potensi lahan yang ada serta komoditi unggulan yang diarahkan pada pengembangan industri yang prospektif dan mampu menciptakan lapangan kerja baru, peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai tujuan pembangunan dan visi, Misi serta arah kebijakan KAPET dan KEK dimasa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo (2005) Teori-teori Lokasi dan Pengembangan Wilayah. Lembaga , LEPHAS, Makassar.
- Azis,Iwan Jaya (1994),ilmu Ekonomi Regional dan beberapa aplikasinya di Indonesia , Penerbit LPFE-UI Jakarta Indonesia.
- Aini Noor, Khalifah. (1995). *Dynamic Comparative Advantage of ASEAN Countries*. Jurnal Ekonomi Malaysia 29 (p. 131-159).
- Arsyad, Lincolin. (1999). *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*, BPFE-Yogyakarta.
- Bratakusuma, Supriadi,Riyadi (2004) Perencanaan Pembangunan Daerah ;Startegi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah,Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Badan Pusat Statistik.(1999), Badan pusat Statistik Sulawesi Selatan

- Basri, H. Faisal. (1995). *Identifikasi Komoditas Ekspor yang Memiliki Keunggulan Komparatif dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya; Kasus Indonesia*, Jurnal FE-UI Vol. 1. Jakarta.
- Bruno, M (1972) *Domestic Resource Cost Effective Protection: Clasification and Synthesis* , Juornal of Political Economic
- Ballasa, Bela and Marcus Noland (1989), *Revalead Comparative Advantage* Infant japan and the United States, Journal of Internasional Economic Integration 4 (2) Autum (8-22)
- Blakely,Edwar J.,(1989) *Planning Lokal Economic Development Theory and Practice*, I edition, Sage Publication Inc., Calofornia.
- Chenery, Hollis and, T.N. Srinivasan , (1989) *Hand book Development Economic*, Nort Holland Amesterdam New York Oxfood Tokyo.
- Clive Gray , (1997) *Pengantar evaluasi proyek Edisi kedua* , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Chenery, Hollis and, T.N. Srinivasan ,(1989)*Hand book Development Economic*, Nort Holland Amesterdam New York Oxfood Tokyo.

Harry W. Richardson, (1991), Dasar-dasar Ilmu ekonomi Regional ;penerjemah Paul Sitohang , LPFE.UI, Jakarta.

Hirschman, Albert, O, (1970), Strategi pembangunan Ekonomi: Terjemahan Paul Sitohang , PT. Dian Rakyat Jakarta.

Hoover, Edgar (1977) Pengantar Ekonomi Regional, FE-UI, Jakarta.

Howard, Pack (1989) Industrialization and Trade , North Holland Amsterdam-New York Oxford-Tokyo.

Hidayat, Agus Syarif Hidayat (2010) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) PT Raja Grafindo Persada Jakarta bekerjasama dengan Pemerintah Kepulauan Riau dan BPMPD.

Hambrick D. C. (1981), “ *Environment, Strategy and Power Within Top Management Team*”, Administrative Science Quarterly, 26:253-276.

Hayes, R., & G. P. Pisano, (1994), “*The New Manufacturing Strategy*”, Harvard Business Review, January-February; 77-86.

Hisrich R.D., & Peters M.P. (1995), “*Entrepreneurship*”, Irwin, Chicago.

- Hessel Nogi, S,(2003), Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Government, Penerbit Balairung & Co, Yogyakarta.
- Jhingan, M.L, (2007), Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, PT. Raja grafindo Persada, Jakarta.
- Jhingan M,L, (1983) the economic of Development and Planning . Nicas Publishing House LTD, New Delhi.
- Jones G. & Butler J., (1992), "*Managing Internal Corporate Entrepreneship: An Agency Theory Perspective*", Journal of Management, 18; 733-749.
- Kartasasmita, Ginandjar, (1995), Pembangunan Untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan, CIDES, Jakarta.
- Koentjaraningrat, (2004), Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, Djambatan, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajat, (2000), Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah dan Kebijakan, Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YPKN, Yogyakarta.
- Kapet (2011) Data Base Sistem Infrastruktur Pendukung Pengembangan Kapet Parepare.

- Khalifah, Aini Noor, (1995), Dynamic Comparative Advantage of ASEAN Countries . JURNAL Ekonomi,Malaysia 29 (131-159).
- Kementrian Perhubungan RI. Nomor HK.107/1/4/DTPL Pemerintah Provinsi dan Kab.Barru No.6/FKS/BR/V/2012 tentang pelabuhan Garongkong.
- Lerner, Daniel, (1978), Teknologi, Komunikasi dan Pembangunan, dalam Eduard Depari dan Colin Mc Andrew, eds, Peranan Komunikasi Massa Dalam Pembangunan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Linden, Russel.M, (1994) Seameless Government :A Practical Guide to Re-Engginering in the Public Sector, Jossy Bass Publishers,San Fransisco.
- Munir Riffan , Fitanto (2008) Pengembangan Ekonomi Lokal,LGSP-USAID.
- Myint, Hlia (1992). Aperspective on Inward – and outwardloking Strategies in The Asian –Pasific Ragon, Published by Institute of Developing Economics 42 ichigaya –Hommusa Cho-Shukuyuku Tokyo, Japan.

Martani Husaini (2000) *menata ulang strategi pemasaran internasional* Indonesia, Jurnal Reformasi Ekonomi Vol.1 No.1.

Moelyono Mauled (2010) *Menggerakkan Ekonomi Kreatif (Antara tuntutan dan Kebutuhan)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Morissan (2004) *Pemerintah Daerah UU No.32 Tahun 2004 Beserta Penjelasannya*, Ramdina Prakarsa Cilendung, Tangerang.

Nogroho Riant D, (2000), *Otonomi Daerah Desentralisasi tanpa revolusi*, PT, Eilex Media Komputindo.

Navajas Ruz Alvaro (2001) *Credit Gurante Schemes :Conceptual Frame, Financial System Development Project*, GTZ/FONDESIF.

Ndraha, Taliziduhu, (1987), *Pembangunan Masyarakat : Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, Bina Aksara, Jakarta.

Porter, Michael, E (1993) *Keunggulan bersaing menciptakan dan mempertahankan kinerja unggul*, Erlangga, Jakarta.

Puskaped (2005) Kajian Pembentukan Kawasan Niaga Maritim (KNM) Kerjasama Bappeda Makassar,

PP No.26/2008 ,tentang RTRWN dalam lampiran (Kawasan Strategis)

PP No 29/2008 tentang kawasan strategis cepat tumbuh.

Perpres No.32/2011 tentang MP3EI 2011-2025

Ray, David (1999), Indonesia in Emerging Global Knowledge Economy Demand Side Pressures to Upgrade, Gajah Mada Internasional , Journal of Business, Vol. No.2 PP 1-36.

Restuti Widayati, Abu Zar, (1983), penggunaan Analysis Constan Market Share (CMSA), forum statistic No.4 Jakarta.

Reid, D. (1989), *"Operationalizing Strategic Planning"*, Strategic Management Journal", 10:553-567.

Suerjodibroto,Guritno (2004) Buku 2 Tataruang dalam Pembangunan Kota yang berkelanjutan,ADEKSI Koandran Adenauer Stiftung (KAS), Jakarta.

Susanto Dkk(2010) Revensi Pembangunan Ekonomi Daerah 'bagaimana membangun Kerjasama daerah'.

- Saragih, Bungaran. (1997). *Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian*.
- Sinungan. (2002). *Produktivitas, Apa dan Bagaimana*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Soepono Prassetyo. (1999). *Teori Lokasi: Presentasi Landasan Mikro bagi Teori Pembangunan Daerah*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia.
- Siagian, Sondang. P, 2008, *Administrasi Pembangunan : Konsep, dimensi, dan strateginya*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sudono, Sakirno, 1985, *Ekonomi Pembangunan : proses, masalah, dan dasar kebijaksanaan*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Tambunan, Manggara. (1999). *Desentralisasi dan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah dalam Pembangunan Ekonomi Daerah*. Analisis CSIS, Tahun XXVIII/No. 3.
- Temenggung , Syarifuddin (1997), *paradigma ekonomi wilayah Tinjauan teori dan praktis Ekonomi wilayah dan implikasi Kebijakan pembangunan , Bunga rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia*, Gramedia Widia Sarana Indonesia Jakarta.

Tower ,Edwar (1992) *Domestic Resource Cost Journal of International Economic Integration* 1(1) Spring, (20-44) Duke University.

Tarigan, Robinson (2004) *Perencanaan Pembangunan Wilayah* , Medi Grafika Jakarta.

Tikson, Deddy. T,(2005), *Keterbelakangan dan Ketergantungan : Teori Pembangunan di Indonesia, Malaysia dan Thailand*, Ininnawa, Makassar.

Todaro, Michael, (1983), *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Todaro Michal. P (2006),*Pembangunan Ekonomi* Erlangga Jakarta

Word Bank, (2001),*Local Economic Development, Urban Development Unit*, Washinton D.C., August.

Penulis



Dr. Mukhlis Sufri, SE, MSi, Lahir di Palopo, 17 September 1962, adalah Dosen Fakultas Ekonomi dan UMI dan bekerja Sebagai Anggota Dewan Pengawas PT. Bank Sulelbar, Direktur Pusat Kajian Pengembangan Ekonomi Daerah (PUSAPED), Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi UMI (1986), Magister Sains Kajian Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan Unhas (1993), dan Doktor Ilmu Ekonomi dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya (2003). Pernah dipercaya sebagai Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi UMI (1994), Kepala Pusat Kajian dan Da'wah pada Pascasarjana UMI (2004), dilibatkan sebagai staf ahli Bidang Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan sejak tahun 2004 di Kabupaten Luwu, Kota Makassar, Kabupaten Takalar, Staf Ahli DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Staf Ahli Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Anggota Dewan Riset Daerah (DRD) tahun 2008 dan Staf Ahli program KSN, fasilitasi Investasi dan perencanaan Bisnis KAPET Parepare. Terlibat dalam sejumlah perumusan perencanaan pembangunan daerah, tata ruang Kabupaten Luwu, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan RPJMD Kabupaten Takalar, Mamuju, Kota Makassar, Pernah menjadi Konsultan Contract dan fasilitator bidang perencanaan dan ekonomi lokal (USAID-LGSP) 2006-2009 dan melakukan riset dan kajian pengembangan Kawasan pesisir Manado, Sorong dan Kota Makassar serta model pengembangan klinik bisnis terpadu. Aktif menjadi narasumber dalam berbagai seminar dan pelatihan bidang perencanaan pembangunan dan pengembangan ekonomi syariah. Pengalaman di bidang organisasi, Wakil Ketua Aku-UPKKS, Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES Sulsel) Sulsel

